



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan, namun demikian masih ada permasalahan dibidang kesehatan yaitu masih adanya potensi kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk dan kurang pada balita serta stunting pada balita. Tingginya angka penyakit menular potensial wabah terutama demam berdarah dan penyakit akibat gaya hidup (misalnya penyakit degeneratif) juga merupakan permasalahan ganda epidemiologi yang tetap menjadi tantangan pembangunan kesehatan. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati di Bidang Kesehatan. Dalam rangka merencanakan secara sistematis upaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2024, disusunlah Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan perumusan Rencana Kerja perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Renstra Perangkat daerah dan RKPD. Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dikarenakan merupakan penerjemahan perencanaan Daerah (RPD dan Renstra) ke dalam perencanaan, program dan penganggaran tahunan.



Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator) yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi penghubung antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan juga memuat usulan dari Pokok Pikiran, Hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Kerja (Renja Kerja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dan akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008, dan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kedudukan Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas dibidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan.
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang kesehatan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan.
4. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan kesehatan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesehatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja SKPD, antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow utara di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.nomor 5587] sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara nomor 5 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara nomor tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026.
12. Peraturan Bupati nomor tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 adalah memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2024) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.
- b. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.



2. Tujuan

- a. Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;
- c. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah; serta
- d. Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan.
- e. Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat
- f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2022 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar indikator sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

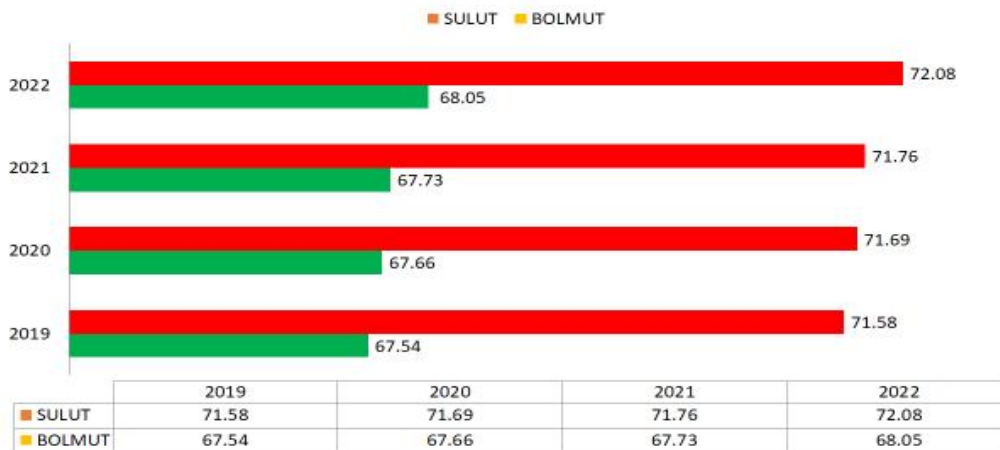
Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2024, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Selain itu, salah satu target kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah prosentase capaian atau realisasi APBD tiap program dan kegiatan.

Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. angka ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diidentifikasi sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Indikator angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang merepresentasikan aspek kesehatan terus meningkat sejak tahun 2019. Semakin meningkatnya AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin membaik, karena AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Pada Tahun 2022 ini sesuai dengan Target Kerja Dinas Kesehatan 67.36, memperoleh angka AHH 68.05 naik 0.32 dari Tahun sebelumnya 67.73 sehingga untuk capaian angka harapan hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara sudah capai target.



Peningkatan ini menunjukkan bahwa, kualitas kesehatan penduduk di Bolaang Mongondow Utara semakin membaik

Grafik 2.1
Angka Harapan Hidup
Tahun 2019 - 2022



Sumber : Data BPS Tahun 2022

Berdasarkan Grafik Diatas, Capaian Angka Harapan Hidup Kab. Bolaang Mongondow masih dibawah dari capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Utara yaitu 72.08, Dinas Kesehatan Kab. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selalu berupaya untuk meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup di Kab. Bolaang Mongondow Utara.

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

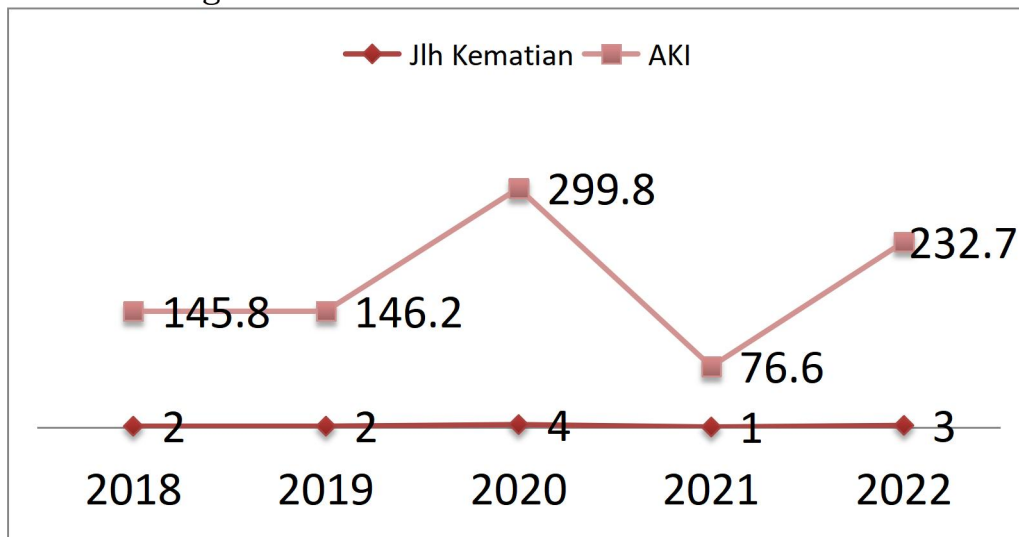
1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu Tahun 2022 232.7 (3 Kasus) Per 100.000 Kelahiran Hidup dengan menggunakan perhitungan *Maternal Mortality Rate (MMR)*, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum mencapaian target Rasio Angka Kematian Ibu secara Nasional 183/100.000 kelahiran hidup untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongodondow Utara target kematian ibu 2 orang dan pada tahun 2022 terdapat Kematian Ibu 3 kasus dari total Kelahiran Hidup 1286. Angka Kematian Ibu Tahun 2022 mengalami Peningkatan dari Tahun 2021 76,3 (1 Kasus) hal ini di karenakan banyaknya jumlah ibu hamil dengan risiko tinggi, Terlalu Tua dan Terlalu

Muda untuk hamil. Sudah dilakukan tindakan pertolongan persalinan sesuai prosedur akan tetapi mengalami kendala pada akses rujukan Rumah Sakit yang terlalu jauh dan adanya penolakan dari Pihak keluarga untuk dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit meskipun sudah dilakukan edukasi oleh tenaga kesehatan sehingga memperlambat proses rujukan.

Grafik 2.2
Angka Kasus Kematian Ibu Tahun 2018-2022



Sumber : Dinkes Kab. Bolmut, 2022

Sesuai dengan Target Renstra, Angka kematian Ibu Tahun 2022 153/100.000 KLH, capaian Tahun 2022 (232.7/100.000 KLH), Untuk Capaian Kinerja Indikator Angka kematian Ibu Tahun 2022 65.74% (belum capai target). pentingnya optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan agar penurunan angka kematian ibu dan bayi tidak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Penyebab kematian ibu yaitu :

Tabel 2.1
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022

No	Penyebab Kematian	Jumlah Kematian	Ket
1	Pre Eklampsia	2	Kasus
2	Infeksi Post Operasi	1	Kasus
Jumlah		3	Kasus

- Cakupan Universal Health Coverage (UHC)Tabel 2.2
Jumlah Kepesertaan JKN Tahun 2020-2022

No	Kepesertaan	Jumlah		
		2020	2021	2022
1	Jamkesmas (PBI APBN)	32.966	28.543	26.816
2	Jamkesda (PBI APBD)	21.904	20.277	20.915
3	Jamkesda (PBI APBD Prov)	9.288	920	-
4	Askes/Pegawai Negeri (PPU)	7.275	9.960	7.810
5	Swasta / Badan Usaha (PP-BU)	155	-	2.147
6	Peserta Mandiri (PBPU)	9.754	9.607	8.711
7	Peserta Bukan Pekerja	910	664	624
Jumlah		82.252	69.971	67.023
Jumlah Penduduk		84.855	85.803	85.707
%		96.93%	81.54%	78.2%

Berdasarkan data diatas, capaian kepesertaan JKN Tahun 2020 sudah mencapai target Nasional 96%, sehingga pada tahun 2020 ini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah Universal Health Coverage untuk Kepesertaan JKN. Hal ini karena dukungan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang telah mengalokasikan dana anggaran JKN Pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Berdasarkan Data Dari BPJS Cabang Bolaang Mongondow Utara, Pada Tahun 2022 capaian Kepesertaan JKN/KIS 78.2%, belum mencapai target nasional karena tidak ada kepesertaan dari Pembiayaan APBD Provinsi dan belum ada penambahan kuota untuk Pembiayaan dari APBD Kabupaten. Dari data yang diperoleh masih terdapat 18.684 (21.8%) Jumlah Penduduk Bolaang Mongondow Utara yang belum menjadi Kepesertaan JKN.

- Indeks Keluarga Sehat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Kementerian Kesehatan telah merumuskan 12 Indikator yang dipakai untuk menentukan suatu keluarga tergolong sehat atau tidak. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan Program PIS-PK Pada



Tahun 2018 dengan Lokus 2 Puskesmas yang menjadi Percontohan penggunaan Aplikasi dan Pendataan Keluarga Sehat. Pada Tahun 2019 seluruh Puskesmas di kerahkan untuk melakukan Pendataan ke rumah-rumah penduduk dan dilakukan Entry data pada Aplikasi PIS-PK dan Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dengan adanya Kendala Pandemi Covid-19 tenaga Kesehatan Puskesmas belum menyelesaikan pendataan dan entry data, sehingga capaian Indeks Keluarga Sehat Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 belum mencapai target dengan Capaian 0.136 dari Target 0.400.

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Rasio jumlah Puskesmas per 25.730 Penduduk, di kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan melihat Jumlah Penduduk dengan jumlah puskesmas yang ada, dapat terlihat bahwa sarana pelayanan kesehatan sudah dapat terpenuhi. Karena 1 Puskesmas melayani 25.730 Penduduk dan dengan melihat jumlah puskesmas yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk 90.426 sudah dapat terlayani secara keseluruhan.

Selain itu juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 75 tahun 2014 Tentang Puskesmas, Persyaratan Pendirian Puskesmas adalah Puskesmas harus di dirikan dalam 1 Kecamatan dan atau dalam kondisi tertentu dapat di dirikan lebih dari 1 puskesmas. Dari persyaratan ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah memenuhi persyaratan Karena dalam 1 kecamatan sudah ada 2 puskesmas yang di dirikan yaitu 1 Puskesmas Rawat Inap dan 1 Puskesmas Rawat Jalan. Pada Tahun 2020 dilihat dari fisik bangunan masih terdapat 4 Puskesmas Rawat jalan yang belum sesuai standar, Dinas Kesehatan telah berupaya untuk melaksanakan Rehabilitasi Berat 4 Puskesmas melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan, Yaitu Puskesmas Sangkub, Puskesmas Bintauna Pantai, Puskesmas Mokoditek, dan Puskesmas Ollot.



Pada Tahun 2022 dilaksanakan Rehabilitasi Berat Puskesmas Tuntung melalui Dana Alokasi Khusus. Sesuai dengan Target Fasyankes yang memenuhi standar, pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan telah melebihi standar Indikator Rehabilitasi Puskesmas, Rehabilitasi Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dengan adanya DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Insentif Daerah.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

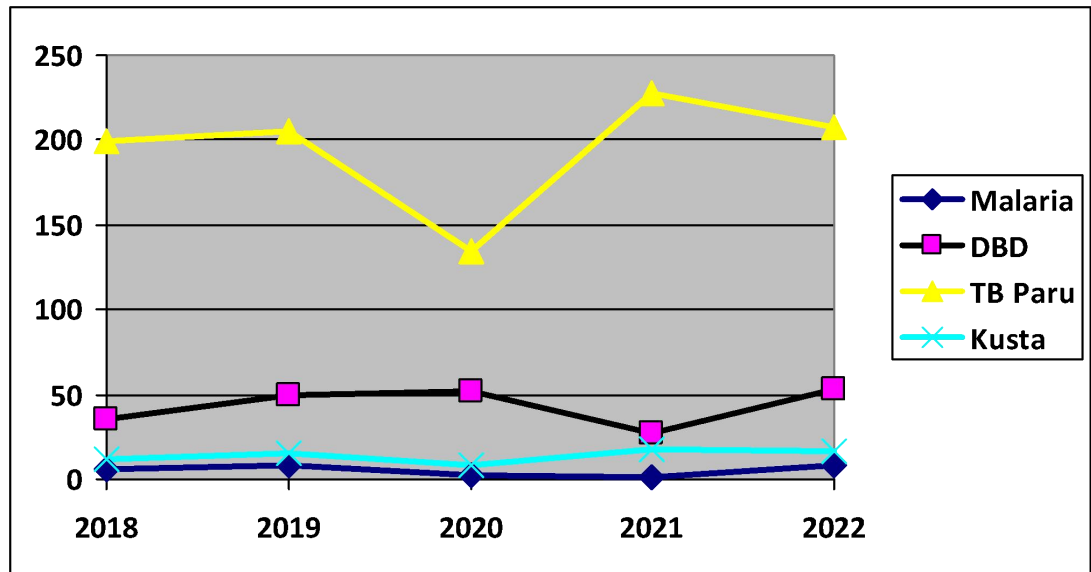
- **Persentase Penurunan Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular**
Penyakit Menular

Tabel 2.3
Kasus Penyakit Menular di Masyarakat Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jlh Penderita Malaria	6	8	2	1	8
	Jlh Yang tertangani	6	8	2	1	8
	%	100	100	100	100	100
2	Jlh Penderita DBD	35	49	52	27	53
	Jlh Yang Tertangani	35	49	52	27	53
	%	100	100	100	100	100
3	Jlh Penderita TB Paru	199	205	134	228	208
	Jlh Yang tertangani	199	205	134	228	208
	%	100	100	100	100	100
4	Jlh Penderita Kusta	12	15	8	18	16
	Jlh Yang Tertangani	12	12	8	18	16
	%	100	100	100	100	100
5	Jlh Penderita HIV		16	17	12	15
	Jlh Yang Tertangani		16	17	12	15
	%		100	100	100	100
6	Jlh Covid-19			29	574	94
	Jlh Yg di Tangani			29	574	94
				100%	100%	100%



Grafik 2.3
Penyakit menular di Masyarakat Tahun 2016 s.d 2022



Angka kejadian kasus DBD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus dari tahun 2021 yang hanya 27 kasus. Peningkatan kasus demam berdarah pada tahun 2022 sebanyak 53 kasus dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Untuk deteksi dini kasus DBD , program DBD pada tahun 2022 ditunjang dengan alat RDT DBD NS1 sehingga untuk kegiatan penyelidikan epidemiologi dan survey demam kasus DBD lebih cepat terdeteksi.
2. Lingkungan secara signifikan mempengaruhi kesakitan bagi setiap individu termasuk sosial, ekonomi, dan lebih utamanya perilaku masyarakat, meningkatnya mobilitas penduduk, kepadatan hunian, semakin baiknya sarana transportasi dan masih terdapat tempat perindukan nyamuk penular DBD.
3. Faktor perilaku pencegahan yang seharusnya secara rutin dilakukan tetapi masih kurang diperhatikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dengan lingkungan yang dapat meningkatkan kejadian DBD.



Trand penemuan kasus TBC tahun 2022 sebanyak 208 kasus, dari target 257 kasus. Penemuan kasus tahun 2022 mengalami penurunan dari 2021, dikarena banyak pengelola program yang pindah tugas/mutasi/berhenti. Sehingga kegiatan penemuan kasusnya menurun dan adanya kekosongan tenaga analis dalam Lab TBC sehingga pemeriksaan di puskesmas pun menurun. Pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi Peningkatan Kasus TB Paru karena dengan dilakukan Skrinning dan Trecing Covid-19 angka penemuan kasus TB menjadi meningkat, dengan gejala TB Paru dan Covid-19 yang hampir mirip.

Penemuan kasus kusta 2022 mengalami penurunan dari penemuan kasus kusta 2021 sebanyak 16 kasus. Penurunan ini disebabkan adanya kegiatan aktif di tahun 2021 sehingga penemuan kasus 2022 mengalami penurunan. Akan tetapi tidak di imbangi dengan kegiatan aktif di tahun 2022, sehingga penurunan itu perlu dilakukan pemeriksaan aktif terhadap daerah endemis. Kab. Bolmut memilih estimasi penemuan kasus kusta 1:10.000 jlmh penduduk, dengan angka estimasi 6 kasus dlam 1 tahun.

Trend penemuan kasus malaria sejak tahun 2021 sampai 2022 terjadi kenaikan yaitu dari 1 kasus positif terkonfirmasi malaria di tahun 2021 menjadi 8 kasus positif terkonfirmasi malaria di tahun 2022. Annual Parasite Insident (API) kabupaten yaitu 0,01/1000 penduduk di tahun 2021 menjadi 0,1/1000 penduduk di tahun 2022. bila di lihat dari angka penemuan kasus bisa di simpulkan bahwa kegiatan Case Aktif Detection kasus malaria melalui survey migrasi semakin sudah semakin aktif di laksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, hal ini di dukung oleh adanya anggaran Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas maupun Dinas Kesehatan. data ini di kuatkan dengan angka Slide Positif Rate (SPR) kabupaten yang berada di angka <5%, serta klasifikasi kasus positif yang di temukan merupakan kasus import dari daerah-daerah endemis malaria di Indonesia dan tidak di temukan kasus penularan setempat. namun dari beberapa keberhasilan tersebut terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan pengendalian malaria yang antaranya : Angka Annual Blood Exemination Rate (ABER) 0,03 % yang masih sangat jauh dari target yaitu sebesar 10% hal ini dikarenakan



beberapa faktor penghambat yaitu tidak adanya tenaga laboratorium di seluruh puskesmas sehingga deteksi dini berbasis laboratorium tidak sepenuhnya terealisasi, di samping pelatihan peningkatan kapasitas petugas tentang penyakit malaria yang masih minim.

HIV jumlah kasus 15 meninggal 5 orang. 1 di antaranya anak berumur 4 tahun. Trend kasus HIV mengalami peningkatan pada tahun 2021 berjumlah 12 orang dan tahun 2022 bertambah menjadi 15 orang. Peningkatan kasus positif HIV/AIDS karena pengelola program yang ada di wilayah kerja puskesmas selalu melaksanakan Screening dengan menggunakan rapid baik pada ibu hamil maupun orang yang mempunyai keluhan serta tanda dan gejala HIV/AIDS. Hambatan : Adanya penolakan untuk melakukan pemeriksaan kontak, Tantangan : Masih adanya Diskriminasi pada Orang yang dengan HIV/AIDS.

Grafik 2.4



Pada kurva epidemiologi kasus Covid-19 diatas kita dapat melihat bahwa pada bulan januari ada 3 kasus positif Covid-19 dan 1 kematian. 1 kasus kematian adalah lansia usia 63 tahun dengan gejala Demam, mual dan muntah, pasien belum pernah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Kemudian terjadi peningkatan kasus pada bulan februari yaitu sebanyak 37 kasus dan pada bulan maret 47 kasus. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh varian omicron, mobilisasi masyarakat yang masih tetap tinggi dan tingkat



ketaatan terhadap PROKES (5M) mulai kendor. Pada bulan April hingga Agustus terjadi penurunan kasus secara fluktuatif. Tetapi pada bulan september terjadi peningkatan kasus sebanyak 7 kasus. Kasus positif ini adalah kasus yang terdeteksi melalui Fasyankes artinya kasus tersebut memiliki gejala dan atau datang berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk berobat yang selanjutnya terskrining melalui surveilans pasif di fasyankes dengan testing RDT Antigen ataupun PCR. Kasus kembali menurun pada bulan oktober hingga desember.

Gambaran Epidemiologi pada grafik diatas menunjukkan bahwa angka kasus konfirmasi positif dari puncak tertinggi (Maret = 47 kasus) hingga Agustus terjadi penurunan 100% dari puncak kasus. Tetapi meningkat kembali pada bulan september (7 kasus) atau 14 % dari jumlah Puncak kasus tertinggi. Selanjutnya di bulan – bulan berikut menurun 100%.

Upaya Pencegahan terus dilakukan salah satunya adalah melakukan PHBS, menggunakan masker bagi yang beraktifitas di keramaian, diruangan tertutup dan padat orang, lansia, ibu hamil, dan orang yang bergejala batuk, pilek, dan demam.

Dinas kesehatan Kab Bolaang Mongondow Utara juga terus melakukan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 lengkap (Dosis 1 dan 2) serta Booster (dosis 3) bagi yang telah memenuhi kriteria yaitu jarak 3 bulan dari vaksinasi ke dua sebagai pencegahan Covid-19.



Tabel 2.4
VAKSINASI COVID-19 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

	TOTAL	%
SASARAN MASY UMUM	63.692	
DOSIS I	52.750	82,82%
DOSIS II	35.938	56,42%
DOSISI III	7.015	10,01%
SASARAN ANAK	8.736	
DOSIS I	6.731	77,04%
DOSIS II	4.617	52,85%
TOTAL SASARAN	72.428	
DOSIS I	59.481	82,12%
DOSIS II	40.555	55,99%
DOSIS III	7.867	10,86%
DOSIS IV	292	

Penyakit Tidak Menular

Tabel 2.5
Kasus Penyakit Tidak Menular di Masyarakat
Tahun 2009-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Jlh Penderita Hipertensi	3498	13985	13985	13985
	Jlh Yang tertangani	3498	7085	10128	10910
	%	100%	51%	72%	78 %
2	Jlh Penderita Diabetes Melitus	244	941	1394	1690
	Jlh Yang Tertangani	244	1312	1394	1690
	%	100%	139%	100%	100%
3	Jlh Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	155	135	163	156
	Jlh Yang tertangani	116	95	163	156
	%	75%	70%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, presetase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan 78%, secara keseluruhan di tiap puskesmas. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dilaksanakan di Fasyankes dan di Posbindu PTM, karena masih dalam suasana Pandemi Covid-19 sehingga tingkat



kehadiran masyarakat dalam posyandu masih rendah. Persentase penderita hipertensi terbanyak adalah perempuan sebanyak 7.757 orang (71%) dan penderita hipertensi laki-laki 3.153 orang (29%). Dari total penderita hipertensi yang tertinggi di Puskesmas Boroko 1510 Orang (13,8%) dari total Jumlah Penderita.

Jumlah sasaran penderita diabetes melitus di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1690 Orang, dan yang mendapatkan Pelayanan 1690 orang. Hal ini melebihi dari target sasaran dengan dilaksanakannya Skrinning PTM di masyarakat. Dapat di lihat bahwa terjadi peningkatan kasus dari tahun sebelumnya. penderita laki-laki berjumlah 300 Orang dan perempuan 1094 Orang lebih banyak dari penderita laki-laki. Wilayah kerja Puskesmas Boroko merupakan daerah dengan tingkat penderita DM paling banyak yaitu 296 Orang.

Berdasarkan sasaran kasus baru ODGJ di tahun 2022 156 kasus, wilayah kerja Puskesmas Boroko, Puskesmas Bolangitang dan Puskesmas Ollot merupakan puskesmas dengan tingkat penemuan kasus baru yang tinggi. Jumlah keseluruhan kasus ODGJ yang tertangani adalah 156 kasus dan masih ada beberapa penderita kesehatan jiwa yang belum terdata.

- **Persentase Fasilitas Kesehatan Bermutu dan Terstandarisasi**

Akreditasi Puskesmas dan RSUD adalah pengakuan terhadap puskesmas dan RSUD yang diberikan oleh Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas dan RSUD telah memenuhi **standar pelayanan puskesmas dan RSUD** yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dan RSUD secara berkesinambungan.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali yang dilakukan oleh Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi (Komisi Akreditasi) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.

Pada Sasaran meningkatnya mutu layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilihat dari Berapa Banyak jumlah Puskesmas yang sudah dilaksanakan Survey Akreditasi oleh Tim Surveyor Komisi Akreditasi



Kementerian Kesehatan RI dari Target Tahun 2020 100% realisasi capaian 91.7%.

Tabel.2.6
Akreditasi Puskesmas Tahun 2015 - 2019

NO	PUSKESMAS	KATEGORI	KATEGORI AKREDITASI	TAHUN PEROLEHAN	HASIL	CAPAIAN	KET
1	RSUD	RAWAT INAP	DASAR	2018	1	100%	
2	BOROKO	RAWAT INAP	UTAMA	2019	1	100%	
3	BOLANGITANG	RAWAT INAP	UTAMA	2019	1	100%	
4	BINTAUNA	RAWAT INAP	UTAMA	2019	1	100%	
5	BOHABAK	RAWAT INAP	MADYA	2019	1	100%	
6	OLLOT	RAWAT JALAN	MADYA	2019	1	100%	
7	MOKODITEK	RAWAT JALAN	DASAR	2019	1	100%	
8	SANGTOMB	RAWAT JALAN	MADYA	2018	1	100%	
9	SANGKUB	RAWAT INAP	DASAR	2018	1	100%	
10	BINTAUNA PANTAI	RAWAT JALAN	DASAR	2018	1	100%	
11	BUKO	RAWAT INAP	MADYA	2017	1	100%	
12	TUNTUNG	RAWAT JALAN	MADYA	2017	1	100%	
13	BIONTONG	RAWAT JALAN			-	-	Puskesmas Baru
					12	92.3%	

Dari 11 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semuanya sudah dilaksanakan survey akreditasi sesuai dengan roadmap akreditasi Kab. Bolaang Mongondow Utara, dan sudah memperoleh hasil akreditasi baik Dasar, Madya dan Utama. Kategori Akreditasi Puskesmas terdiri dari Dasar, Madya, Utama dan Paripurna.

Pada Tahun 2020 Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertambah 1 Puskesmas, yaitu Puskesmas Biontong yang telah teregistrasi oleh Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019 dan belum diajukan untuk dilakukan Survey Akreditasi. Pada Tahun 2020 belum dilaksanakan Akreditasi Puskesmas karena Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak terlaksana Akreditasi Puskesmas karena masih dalam Pandemi Covid-19.

Untuk Meningkatkan Mutu Layanan RSUD telah di survey oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Memperoleh Akreditasi Perdana Pada Tahun 2018. Tetapi



pada tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022 belum dilaksanakan akreditasi Rumah Sakit karena adanya Pandemi Covid-19

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai target sesuai dengan perhitungan dari rasio Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup dengan menggunakan perhitungan Infant Mortality Rate (IMR) target RPJMN Rasio Angka Kematian Bayi 16/1000 Kelahiran hidup. Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara target Angka Kematian Bayi Tahun 2022 17.17/1000 Kelahiran Hidup dan pada Tahun 2022 Angka Kematian Bayi 6.98/1000 Kelahiran Hidup dengan total kematian bayi 9 kasus dari 1286 Total Angka Kelahiran Hidup Dalam 1 Tahun, sehingga target kinerja Dinas Kesehatan sudah capai target. Kematian Bayi terdiri dari kematian Neonatal (0-28 Hari) 8 Orang dan Kematian Bayi (29 Hr-11 Bln) 1 Orang. Dengan Penyebab Kematian Neonatal Berat badan Lahir Rendah dan Asfiksia, Penyebab Kematian Bayi Febris.

Grafik 2.5
Angka Kasus Kematian Bayi Tahun 2018-2022



Sumber : Dinkes Kab. Bolmut, 2022

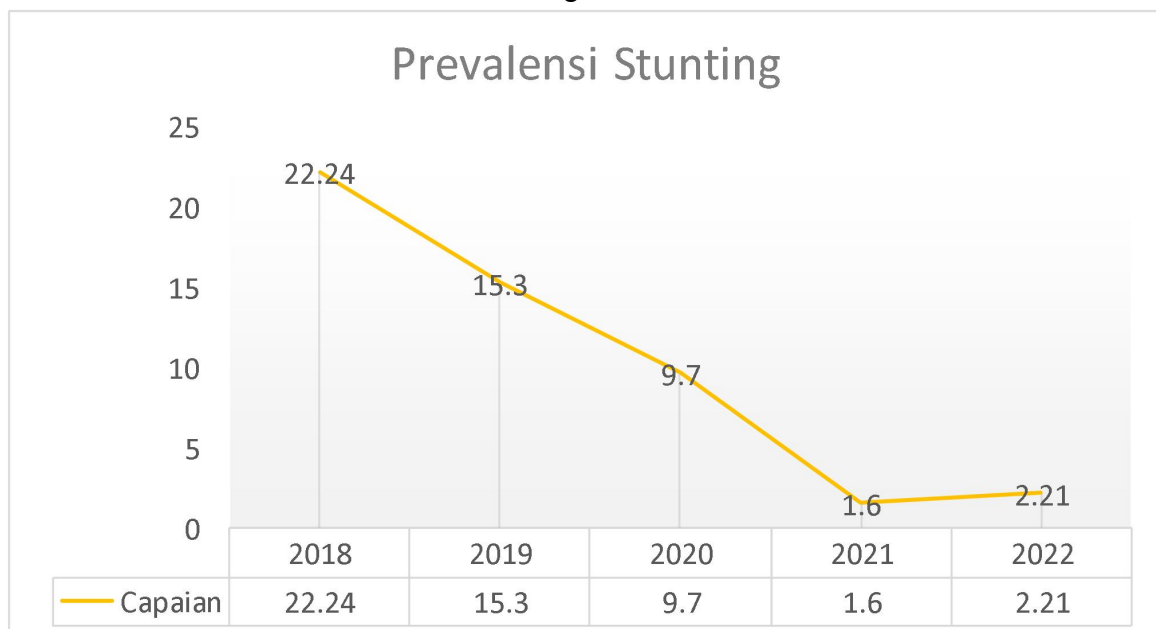
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022 adalah :

Tabel 2.7
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022

No	Penyebab Kematian	Jumlah Kematian 0-28 Hr	Jumlah Kematian 29 Hr – 11 Bulan)
1	BBLR	5	
2	Asfiksia	2	
3	Prematur	1	
4	Demam Tinggi		1
Jumlah		8	1

- Prevalensi Stunting

Grafik 2.6
Prevalensi Stunting Tahun 2018-2022



Pada Tahun 2016, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan kabupaten dengan angka stunting yang tinggi berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan prevalensi sebesar 43,80% menjadi 36,80% pada tahun 2017 dan mengalami penurunan kembali sesuai hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) menunjukkan prevalensi stunting sebesar 22,24%. Pada tahun 2019 berdasarkan hasil e-PPGBM prevalensi stunting sebesar 15,30 %, menjadi 5,01 % pada tahun 2020 turun Kembali pada tahun 2021 sebesar 1,61 %. tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,60%

dengan prevalensi stunting sebesar **2,21%** dengan jumlah balita stunting sebanyak **115** balita.

Terjadinya kenaikan prevalensi stunting sebesar 0,60 % dari tahun sebelumnya (2021) dikarenakan persentase balita yang diukur pada tahun 2022 lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 98,90%. Hal ini yang menyebabkan adanya kemungkinan beberapa balita stunting tidak terdeteksi pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mencapai target stunting pada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 yaitu pada angka 10 persen. Serta mendukung target stunting pemerintah pusat pada RPJMN tahun 2020-2024 yaitu pada angka 14 persen. Namun hal yang perlu menjadi perhatian bersama, masih adanya keluarga berisiko stunting dari 22.716 jumlah keluarga terdapat 48 % atau 10.916 keluarga berisiko stunting yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

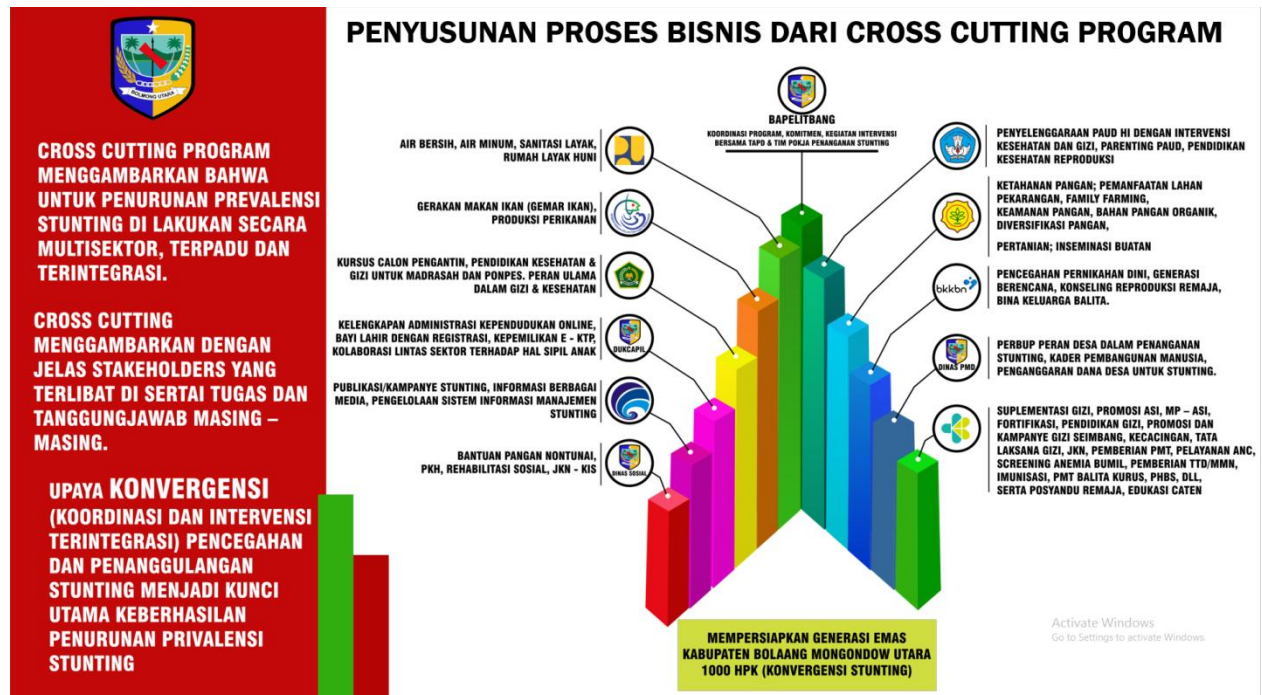
Grafik 2.7
Proses Bisnis Cross Cutting Pencegahan dan
Penanggulangan Stunting Terintegrasi



Upaya intervensi stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dimulai pada tahun 2017. Namun baru bersifat intervensi spesifik (Kesehatan), sementara intervensi sensitif (Sektor lainnya) yang juga menjadi penyebab tidak langsung stunting sudah melakukan Langkah-langkah pencegahan namun belum terintegrasi dengan baik. Sejak tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah

melaksanakan Aksi Konvergensi Stunting dengan melakukan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif dengan melakukan Cross Cutting Program dan kegiatan dengan OPD Lain. Hal ini menyebabkan Koordinasi yang belum berjalan dengan baik, serta intervensi program terhadap indikator spesifik dan indikator sensitif belum tepat sasaran menjadi tepat sasaran dan sangat berpengaruh pada Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Grafik 2.8
Penyusunan Proses Bisnin Dari Cross Cutting Program



Inovasi *Mairu Molihuto Stunting* adalah sebuah inovasi yang diangkat dari kearifan lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana kata *Mairu* memiliki arti ajakan/mengajak, sedangkan *Molihuto* artinya sama dengan Malendong yang artinya bekerja sama, gotong royong (keroyokan). Inovasi *Mairu Molihuto Stunting* memiliki arti luas bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama 15 SKPD terkait, Tim Penggerak PKK, dan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan serta beberapa organisasi lainnya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berikut Inovasi-inovasi SKPD terkait tahun 2022:



1. **Kabulin** (Kawal Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Ibu Menyusui), **Katinting** (Kawal Anak Stunting), **Resepzi** (Remaja Sehat terpenuhi Gizi), **Gema Ceria** (Gerakan Remaja Cerdas Peduli Anemia) oleh Dinas Kesehatan.
2. **Karlota** (Kampanye Antar Kelompok Terbatas), **Andina** (Antisipasi Pernikahan Anak), **MamaKelor** (Mari Makan Kelor) oleh Dinas PPKBPPPA
3. **Gemar Cahting** (Gerakan Bersama TerRpadu Cegah Stunting) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. **Burasa** (Bergerak bersama Bunda PAUD Desa) oleh Dinas Pendidikan
5. **Bakso Gercep PKH** (Bantuan Kesejahteraan Sosial Gerakan Cepat Program Keluarga Harapan) oleh Dinas Sosial
6. **Sari Ayu Camat** (*Desa Mandiri Sayuran Cabe dan Tomat*) oleh Dinas Pertanian
7. **Baper Si Ceting** (Bantuan Perumahan Siap Cegah Stunting) oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. **Gema Daksa** (Gerakan Mencari Data Anak Kena Stunting) dan **Gerda KIA** (Gerakan Dapat Kartu Identitas Anak) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. **Perawan** (Penanganan Daerah Rawan Pangan) oleh Dinas Ketahanan Pangan
10. **Gemari** (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) oleh Dinas Perikanan dan Kelautan
11. **Mairu Molihuto Stunting Website** oleh Dinas Kominfo.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

- Rasio Tenaga Kesehatan

Tabel 2.8
Jumlah Tenaga SDM Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Rumpun SDM Kesehatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Tenaga Kesehatan >> Medis	10	28	38
Tenaga Kesehatan >> Kefarmasian	20	45	65
Tenaga Kesehatan >> Kesehatan Lingkungan	7	18	25
Tenaga Kesehatan >> Keterampilan Fisik	0	1	1
Tenaga Kesehatan >> Teknik Biomedika	5	18	23
Tenaga Kesehatan >> Keperawatan	85	251	336



Tenaga Kesehatan >> Keteknisian Medis	2	15	17
Tenaga Kesehatan >> Nakes lainnya	0	1	1
Tenaga Kesehatan >> Kesehatan Masyarakat	25	95	120
Tenaga Kesehatan >> Gizi	2	44	46
Tenaga Kesehatan >> Kebidanan	0	195	195
Asisten Tenaga Kesehatan >> Kebidanan	0	1	1
Asisten Tenaga Kesehatan >> Kefarmasian	1	3	4
Asisten Tenaga Kesehatan >> Keperawatan	1	2	3
Asisten Tenaga Kesehatan >> Keteknisian Medis	0	4	4
Tenaga Penunjang >> Struktural	5	14	19
Tenaga Penunjang >> Dukungan Manajemen	83	113	196
Total			1094

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan (1094)}}{\text{Jumlah Penduduk (86.406)}} \times 100$$
$$= 1.26$$

Berdasarkan data diatas, jumlah tenaga kesehatan 1094 terdiri dari Tenaga PNS maupun Tenaga Kontrak Daerah, Jumlah Penduduk Tahun 2022 85.803 Jiwa, sehingga Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk Tahun 2022 yaitu 1,26. Terjadi peningkatan dari Tahun 2020 yang hanya mencapai 0.62 karena pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 naik 0.01. Dinas Kesehatan dan RSUD melakukan perekrutan Tenaga Kontrak Daerah dan Di Distribusikan Ke wilayah RSUD, UPTD Puskesmas, UPTD IFK dan TFC. Hal ini di dukung dengan Dana dari APBD maupun DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah terdapat beberapa faktor seperti Penyebab langsung, penyebab tidak langsung, penyebab mendasar maka untuk mengatasinya perlu kerjasama lintas sektor terkait untuk mengatasinya. Disini perlu dibangun kerjasama yang kuat antara Dinas Kesehatan sebagai leading sector bidang kesehatan dan instansi lain yang terkait . Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, melainkan dipengaruhi wujud kontribusi berbagai sektor pembangunan lainnya dan masyarakat.



- a. Mendorong kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan SPM Bidang Kesehatan.
- b. Peningkatan Upaya promotif dan preventif dengan menggunakan media dan metode pendekatan yang kreatif dan inovatif agar tepat sasaran.
- c. Meningkatkan pemerataan akses, jumlah serta kualitas sarana pelayanan kesehatan dan pemenuhan jumlah dan jenis tenaga sesuai standar.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan melalui akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit.
- e. Belum tercapainya Universal Coverage Dalam Hal Jaminan Kesehatan Masyarakat terutama bagi masyarakat miskin karena terdapat penurunan pendanaan dana APBD Provinsi dan APBN sehingga kepesertaan JKN berkurang.
- f. Perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor (integrasi) penanggulangan masalah gizi masyarakat/ stunting di Bolaang Mongondow Utara yang melibatkan berbagai pihak (OPD), Media, dan Kelompok Masyarakat.
- g. Desentralisasi merupakan kesempatan untuk melakukan reformasi di sektor kesehatan, tetapi sekaligus merupakan tantangan baru bagi sektor kesehatan.
- h. Munculnya penyakit-penyakit baru yang dapat memperbesar beban sektor kesehatan

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/ kegiatan apabila target telah tercapai dan peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung berdampak pada peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



Berdasarkan uraian di atas, perlu disusun suatu kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat atau menyebabkan permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, antara lain :

- Mengoptimalisasikan sosialisasi, mobilitasi dan integrasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait terhadap pelaksanaan program kesehatan.
- Optimalisasi sumberdaya manusia yang ada melalui pelatihan dan workshop, disamping itu tetap melakukan penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan di setiap program bidang kesehatan.
- Peningkatan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor, kader kesehatan dan mengaktifkan aparat kewilayahan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- Peningkatan pelayanan kesehatan di setiap sarana kesehatan dan jaringannya yang memenuhi standar mutu.
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam menunjang peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.



Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Renstra 2018-2023	Realisasi s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Renja 2023	Perkiraan Capaian Renstra S/d Tahun 2022	
						Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	%		Realisasi 2023	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	DINAS KESEHATAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelengkapan Administrasi keuangan	Persen	100	100	100	92.96	93	100	97.65	98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Persen	100	100.0	100	93.0	93.0	100	97.65	98
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	100	4	4	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	100	96.89	97	100	98.96	99
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	14	14	100	14	14	100
		Terbayarnya Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai	Bulan	12	10	12	9	75	12	10.3	86
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	20	100	0	0	100	40.00	40
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek/Workshop/Pelatihan dan Sejenisnya	Org	25	15	20	0	0	25	25	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Umum	Persen	100	100	100	86.7	87	100	95.57	96
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Persen	100	90	100	69	69	100	86.2	86
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan	Persen	100	99	100	100	100	100	99.7	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD	Persen	100	90	100	100	100	100	96.7	97
		Persentase Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	99.01	99	100	99.67	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor Yang Diadakan	Unit/Jenis	30	40	30	2	7	30	24.0	80
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	Unit/Jenis	10	20	10	6	60	10	12.0	120
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah KDO Yang Diadakan	Unit	1	1	0	0	0	1	0.7	67
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	93.5	94	100	97.83	98
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Persen	100	100	100	93.00	93	100	97.7	98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen	100	100	100	100.00	100	100	100.0	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	Unit/Jenis	10	10	10	10.00	100	10	10.0	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persen	100	100	100	97.70	98	100	99.2	99



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Renstra 2018-2023	Realisasi s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Renja 2023	Perkiraan Capaian Renstra S/d Tahun 2022	
						Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	%		Realisasi 2023	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan dan Perzinan KDO	Persen	100	84	100	100	100	100	94.7	95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit/Jenis	50	40	40	35	88	50	417	83
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/Kantor Yang Terpelihara	unit	16	16	16	5	31	16	123	77
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Puskesmas dan RSUD Terakreditasi	Persen	95	92.3	92.00	92.3	100	95	95.00	100
		2. Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	917	100.00	917	92	100	94.47	94
		3. Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan PBI/JKN	Persen	97.25	85.56	97.00	78.2	81	97.25	87.00	89
		4. Persentase Pemenuhan Indikator SPM Penyakit Menular, Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar, Orang Resiko terinfeksi HIV, Penderita Hipertensi, Diabetes dan ODGJ Sesuai Standar)	Persen	95	80.13	100.00	84.9	85	100	88.34	93
		5. Persentase Kelompok sasaran Masyarakat (Bayi, Balita, Anak Sekolah, Anak Remaja, Ibu Hamil dan Ibu Nifas) Mendapat Intervensi Gizi	Persen	95	78.93	87.00	68.4	79	95	80.78	85
		6. Standar Pelayanan Minimal Untuk Kelompok Sasaran Ibu, Anak, Remaja, Usia Produktif dan Lanjut Usia	Persen	96	815	89.00	84.3	95	96.0	87.26	91
		7. Persentase Desa/Kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	75	100	70.00	100	143	75	91.67	122
		8. Persentase Operasional Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00	100
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Puskesmas, Rasio Pembantu Puskesmas (Pustu dan Poskesdes), Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0.83	0.77	0.78	0.77	104	0.83	0.80	94
	Pembangunan Puskesmas	Persentase Bangunan Puskesmas Yang Sesuai Standar	Persen	100	83.3	83.3	83.3	100	100	88.9	89
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Direhabilitasi	Unit	1	6	1	1	100	1	8.0	800
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung Instalasi Farmasi Yg direhab Jumlah Bangunan Pustu Yang Direhabilitasi	Unit	4	6	1	0	0	4	10.0	250
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas Medis dan Paramedis di Puskesmas	Unit	5	8	1	0	0	1	9.0	180
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas, IFK dan PSC Yang Memiliki Sarana Sesuai Standar	Unit	13	12	11	10	90.91	11	110	85
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Prasarana Ambulance dan Mobil Operasional Lainnya Yg diadakan	Unit	11	7	2	0	0.00	3	10.0	91
		2. Jumlah Prasarana Pendukung Yang dibangun	Unit	6	12	6	12	200.00	6	30.0	500
		3. Persentase Alat Kesehatan Sesuai Standar	Persen	95	89	90	89	98.89	95	910	96
	Pengadaan Obat, Vaksin (DINKES)	Persentase Pengadaan Obat dan BM HP Puskesmas	Persen	97	97	97	97	100.00	97	97.0	100
	Pengadaan Obat, Vaksin (RS)	Persentase Pengadaan Obat dan BM HP Rumah Sakit	Persen	97	97	97	97	100.00	97	97.0	100
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Bangunan RS Yg dibangun	Unit	1	2	1	2	200	1	2.0	200



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Renstra 2018-2023	Realisasi s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Renja 2023	Perkiraan Capaian Renstra S/d Tahun 2022	
						Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	%		Realisasi 2023	%
						(6)	(7)	(8)		(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan RS yg dilakukan pengembangan	Unit	1	1	1	1	100	1	10	100
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Pemenuhan bahan makanan RS	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan RSUD yang Dipelihara (Kalibrasi)	Unit	20	10	10	3	30	17	10.0	50
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Pelayanan Ibu, Anak, Remaja, Usia Produktif dan Lanjut Usia > 85%	Persen	90	82.1	89	82.5	93	90	84.87	94
		Persentase Operasional Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
		Persentase Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih dan Jamban Sehat	Persen	75	100	75	100	133	75	917	122
		Persentase Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin	Persen	90	90.71	89	86	97	90	88.9	99
		Persentase Balita, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Remaja Putri Mendapatkan PMT, Tablet Fe dan Vitamin A	Persen	100	78.8	100	68.4	68	100	82.4	82
		Persentase Angka Penemuan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persen	86	80	84	80	95	86	82.0	95
		Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi Madya	Persen	9167	615	9167	615	67	9167	716	78
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Puskesmas dan Jaringannya	Persen	95	8151	90	90.24	100	95	88.9	94
		2. Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pertemuan advokasi Risiko Tinggi Kehamilan	Org	30	30	30	30	100	30	30.0	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Persentase Ibu Hamil yang memiliki Jaminan Persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
		2. Persentase Pelayanan Kesehatan Kunjungan Nifas (KNF1)	Persen	97	90.85	96	89.5	93	97	92.4	95
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Jumlah Bayi Baru Lahir yang dilakukan Pelayanan Kesehatan Terpadu	Org	1555	1519	1550	1987	128	1555	1687	108
		2. Persentase Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	Persen	0.46	3.72	0.47	0.71	151	0.46	0.47	102
		3. Jumlah Nakes yg mengikuti pertemuan penguatan advokasi nakes terpadu	Org	30	30	30	30	100	30	30.0	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. Persentase Balita yang Datang di Tempat Pelayanan Kesehatan/Posyandu (D/S)	Persen	97	79.78	95	80.03	84	97	85.6	88
		2. Jumlah Balita yang dilakukan Penanganan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)	Org	200	1673	100	1987	1987	200	150.0	75
		3. Persentase Penjangkauan Siswa	Persen	100	97.13	100	914	91	100	96.2	96
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase remaja putri yg mendapatkan Tablet Tambah darah	Persen	89	614	88	76	86	89	75.5	85
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. Jumlah Posyandu Lansia Aktif	Unit	112	112	112	108	96	112	110.7	99
		2. Jumlah Nakes yg mengikuti Pelatihan Lansia dan geriatri	Org	30	30	30	30	100	30	30.0	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dan Daerah DTPK	Desa	18	12	16	14	88	18	14.7	81
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. Persentase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang yang Mendapatkan Perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
		2. Persentase ASI Eksklusif	Persen	65	46.33	64	31	48	65	47.4	73
		3. Persentase Balita yang Naik Timbangan Berat Badan (N/D)	Persen	95	89.29	90	87	97	95	90.4	95
		4. Jumlah Kegiatan Advokasi dan Intervensi Stunting yg dilaksanakan	Keg	6	8	6	8	133	6	7.3	122



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Renstra 2018-2023	Realisasi s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Renja 2023	Perkiraan Capaian Renstra S/d Tahun 2022	
						Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	%		Realisasi 2023	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pelayanan Pos UKK	Pos	6	3	6	3	50	6	4.0	67
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1Persentase Desa Yang Dilaksanakan Pemucian PAM STBM dan Deklarasi STOP BABS	Persen	75	100	70	100	143	75	917	122
		2Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan, Pasar,Pemeriksaan Sampel Air Minum Dan Makanan.	Kali	4	4	4	4	100	4	4.0	100
		3. Dokumen Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	100	1	10	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Akupunktur Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kelompok Pengembangan TOGA Di Masyarakat	Kelompok	6	0	6	0	0	6	2.0	33
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1Persentase Data Dasar yang Tersedia Dalam Pengambilan Kebijakan Pencegahan Penyakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
		2. Persentase Pemeriksaan pengambilan Sampel Penyakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Operasi katarak	Org	40	101	40	101	253	40	80.7	202
		2. Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Sunatan Massal	Org	180	266	170	266	156	180	237.3	132
		3Presentase Calon Jamaah haji Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up)	Persen	100	33.33	100	0	0	100	44.4	44
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1Persentase Alat dan Bahan Penunjang, Diagnostik Set Program Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
		2. Persentase Petugas Yang Dilatih Program Pelayanan dan Penganggulangan Penyakit Menular dan Tidak menular	Persen	100	100	90	100	111	90	96.7	97
		3. Jumlah Kegiatan Advokasi, Pelatihan dan Intervensi Deteksi Dini Penanganan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular	Keg	23	24	22	24	109	23	23.7	103
		4. Presentase Medical Check Up Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100	100	100	0	0	100	66.7	67
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kepesertaan PBI dari Pembiayaan APBD Kabupaten	org	22300	22000	22200	20277	91	22300	22300.0	100
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Tingkatan Kabupaten Sehat	Wistara	1	1	1	1	100	1	10	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Operasional Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Operasional Pelayanan Kesehatan di PSC 19	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Operasional Pelayanan RS	Persen	100	100	100	100	100	100	100.0	100
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Akreditasi dan Re-Akreditasi,	Unit	12	6	4	0	0	12	6.0	50
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Balita dan Anak Sekolah Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi BIAS	Persen	95	92.83	94	94	100	94	94.0	99
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas RS	Kelas	3	0	0	0	-	3	1.00	33
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah RSUD Yang akan ditingkatkan Kelas	Unit	1	0	1	0	-	1	0.3	33
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Yang Menyusun Profil Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00	100
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Profil Kesehatan Yang Tersusun	Dokumen	13	13	13	13	100	13	13.0	100
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Kegiatan Advokasi, Sosialisasi serta Penyusunan SPM Kesehatan	keg	2	2	2	2	100	2	2.0	100



RENCANA KERJA (RENJA) 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Renstra 2018-2023	Realisasi s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun			Target Renja 2023	Perkiraan Capaian Renstra S/d Tahun 2022	
						Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	%		Realisasi 2023	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	96	94	94	94	100	96	94.67	99
		Persentase Rumah Sakit Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	94	100	94	94	100	96.00	96
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio Tenaga Dokter dan Paramedis	Rasio	0.95	1.04	0.9	1.26	98	0.95	1.08	97
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah di Puskesmas dan Jaringannya	Org	200	200	200	200	100	200	200.0	100
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan Kontrak daerah Di Rumah Sakit	Org	150	100	150	100	67	150	116.7	78
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah Nakes Yang Memiliki STR	Org	325	350	250	350	140	325	3417	105
		2. Jumlah Tenaga Kesehatan yg bersertifikat BTCLS/ATLS (Penanganan Kegawatdaruratan)	Org	160	90	150	0	0	160	83.3	52
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yang memiliki Izin Usaha sesuai standar	Persen	55	32.05	50	52	104	55	46.35	84
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yang mengajukan Permohonan Rekomendasi Izin Usaha	Persen	40	24.52	35	12.55	36	35	72.07	60
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yang dilaksanakan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	unit	225	138	215	150	70	225	1710	76
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kel Yg Melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00	100
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Siaga Aktif	Desa	6	83.67	5	77	1,540	6	55.56	926
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Jenis Media Untuk Kegiatan Kampanye GERMAS	Jenis	3	3	3	3	100	3	3.0	100
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	Persen	85	78.42	80	80	100	85	81.14	95
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Peserta Kampanye Kesehatan	Org	640	367	615	700	114	640	568.9	89
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Posyandu Aktif Per Satuan Balita	Rasio	20.02	20.02	20.02	20.02	100	20.02	20.02	100
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1. Jumlah Posyandu Aktif	unit	112	112	112	112	100	112	112.0	100
		2. Jumlah Kegiatan Orientasi SBH dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Keg	5	4	5	3	60	5	4.0	80



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
	INDIKATOR IKU DINAS KESEHATAN											
1	Angka kematian ibu (AKI)	156	155	154	153	152	299	76.6	232.7	152	155	
2	Angka Kematian Bayi/1000 KH	19.52	18.74	17.95	17.17	16.39	10	8.42	6.98	6.96	7.7	
3	Indeks Keluarga Sehat	0.100	0.300	0.350	0.400	0.450	0.114	0.116	0.136	0.200	0.200	
4	Prevalensi Stunting	15	14.75	9	7	6	9.7	1.61	2.21	2.25	3	
5	Presentase Penurunan Angka Kesakitan Akibat Penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular	40	39	30	25	20	34.9	17.94	18.4	20	20	
6	Cakupan UHC (Universal Health Coverage)	95	96	96.95	97	97.25	96.93	81.54	78.2	97.25	97.25	
7	Rasio Tenaga Kesehatan	0.65	0.70	0.80	0.90	0.95	0.62	1.25	1.26	1.27	1	
8	Persentase Fasilitas Kesehatan bermutu dan Terstandarisasi	91.7	91.7	92	92.3	95	84.6	92.3	92.3	95	95.5	



NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	INDIKATOR IKK/SPM											
1	Rasio daya tampung RS Rujukan	0.003	0.005	0.007	0.009	0.010	0.003	1.8	1.8	0.010	0.010	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	75	80	100	100	100	93.4	100	90.24	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	75	85	100	100	100	100	100	89.50	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	75	85	100	100	100	100	90	92.27	100	100	
6	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	75	85	100	100	100	79.3	80	80.31	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	75	100	100	100	50	89	86.46	100	100	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	40	50	100	100	100	34	49	51.71	100	100	
9	Persentase WN usia 60 tahun keatas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	60	70	100	100	100	100	82	89.95	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	51	72	78.71	100	100	
11	Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



12	Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	83.3	100	100	100	100	
13	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	85	90	100	100	100	52	88.7	80.93	100	100	
14	Persentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	50	51	100	100	100	74.9	63.7	61.17	100	100	

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja utama sesuai dengan Indikator RPJMD berhasil dari target Angka Harapan Hidup Target 67.36 Tahun, Capaian Tahun 2022 adalah 68.05 tahun. Terhadap Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan terdapat 3 sasaran, yang dicapai dengan 6 Program dan 9 indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2022 **Berhasil**.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 hampir semuanya mencapai target kinerja, Dari 8 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum semuanya mencapai target kinerja, terdapat 3 Indikator Yang belum Mencapai target Yaitu Angka Kematian Ibu dari Target 153 Per 100.000 Kelahiran Hidup capaian Realisasi 232.7 Per 100.000 KLH (3 Kasus), Indeks Keluarga Sehat dengan capaian realisasi 0.136 dari target 0.400 dengan persentase capaian 34%, Capaian Universal Health Coverage (UHC) dari target 97% realisasi capaian 78,2% Terdapat kendala pada Pencapaian Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022, selang tahun 2020-2022 secara global maupun Nasional masih dalam suasana Pandemi *Covid-19 dan Pasca Pandemi Covid-19*, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program / kegiatan dari Dinas Kesehatan belum terlalu maksimal dilaksanakan karena masih lebih fokus pada Penanganan Penderita Covid-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, selain 3 Indikator yang tidak capai terget terdapat 5 Indikator yang capai target maupun melebihi dari target capaian yaitu Angka Kematian Bayi Target 17,17 Per 1000 KLH capaian 6.98 Per 1000 KLH, Prevalensi Stunting Target 7% realisasi 2.21%, Persentase Penurunan Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular Target 25% Capaian 18.04% dari Total Kunjungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rasio Tenaga Kesehatan Target 0.90 capaian 1,26,

Persentase Fasilitas Kesehatan Bermutu dan Terstandarisasi Target 100%. Secara umum Dinas Kesehatan berhasil melaksanakan Rencana Tahun 2022 yang menjadi bagian dari Pelaksanaan Rencana Statejik Dinas Kesehatan.

Dari 8 Indikator yang ada Prevalensi Stunting merupakan Indikator yang paling tinggi realisasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan. Dengan melaksanakan Cross Cutting Program/Kegiatan dengan melibatkan 15 SKPD, Tim Penggerak PKK, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Inovasi *Mairu Molihuto Stunting* adalah sebuah inovasi yang diangkat dari kearifan lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana kata *Mairu* memiliki arti ajakan/mengajak, sedangkan *Molihuto* artinya sama dengan Malendong yang artinya bekerja sama, gotong royong (keroyokan). Inovasi *Mairu Molihuto Stunting* memiliki arti luas bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama 15 SKPD terkait, Tim Penggerak PKK, dan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan serta beberapa organisasi lainnya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dari semua upaya yang dilakukan masih diperlukan upaya peningkatan, perbaikan/ penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut Pada Tahun-tahun berikutnya dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

SPM Kesehatan Daerah Kabupaten terdiri atas :

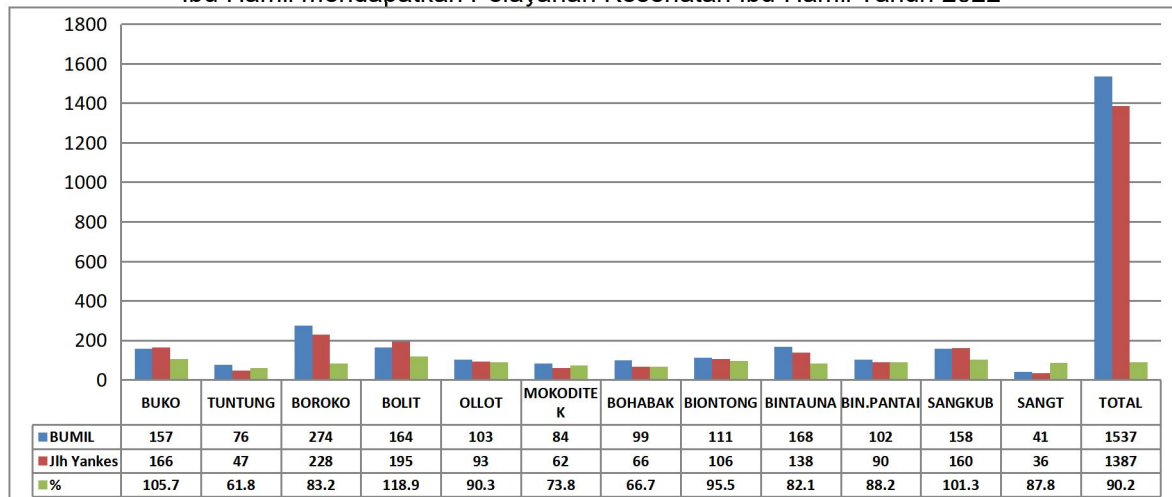
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian presentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil 90.2%, capaian ini belum mencapai target Nasional Tahun 2022 100%. Pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dilaksanakan di Fasyankes, di Posyandu dan Kunjungan Rumah dengan memberikan *antenatal care*, Pemberian tablet tambah darah, pemberian PMT ibu hamil KEK dan pelaksanaan kelas ibu hamil dan senam ibu hamil. Pelayanan Ibu hamil dimulai dari trimester I kehamilan ibu (K1) sampai trimester IV (K4), walaupun mengalami kendala pada kunjungan K4 ibu hamil yang masih rendah, Karena tingginya kehamilan di usia remaja yang kunjungan K4 tidak dapat terpenuhi dan juga kendala karena masih dalam kondisi *Pandemi Covid-19* namun upaya dari tenaga bidan puskesmas untuk melaksanakan antenatal care dengan melaksanakan kunjungan rumah ibu hamil dalam program P4K.



Grafik 2.9

Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2022



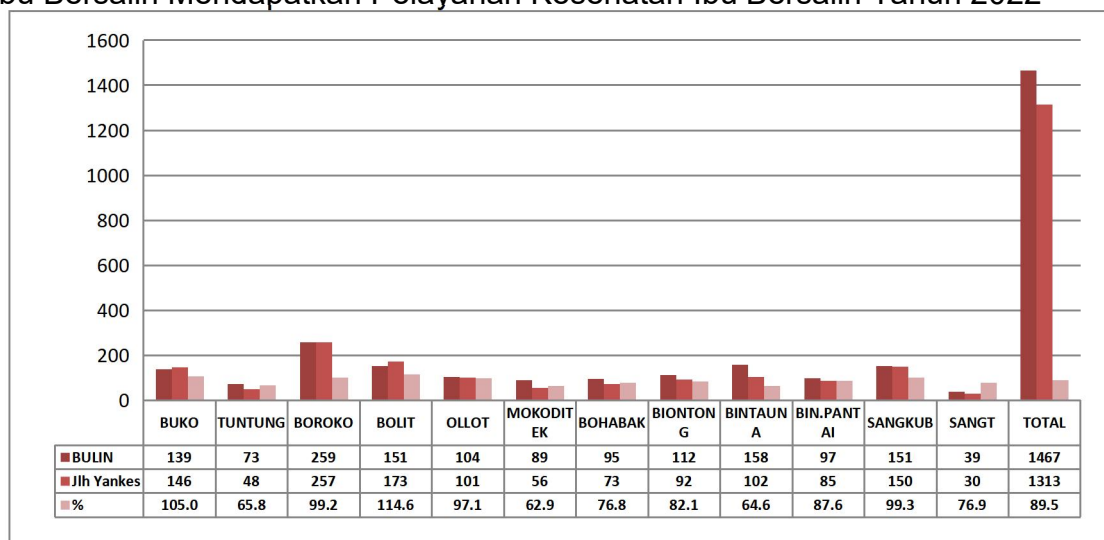
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan	1495	1334	1358	1537
2	Jumlah Ibu Hamil	1495	1427	1358	1387
	% Capaian	100%	93.48%	100%	90.24%

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

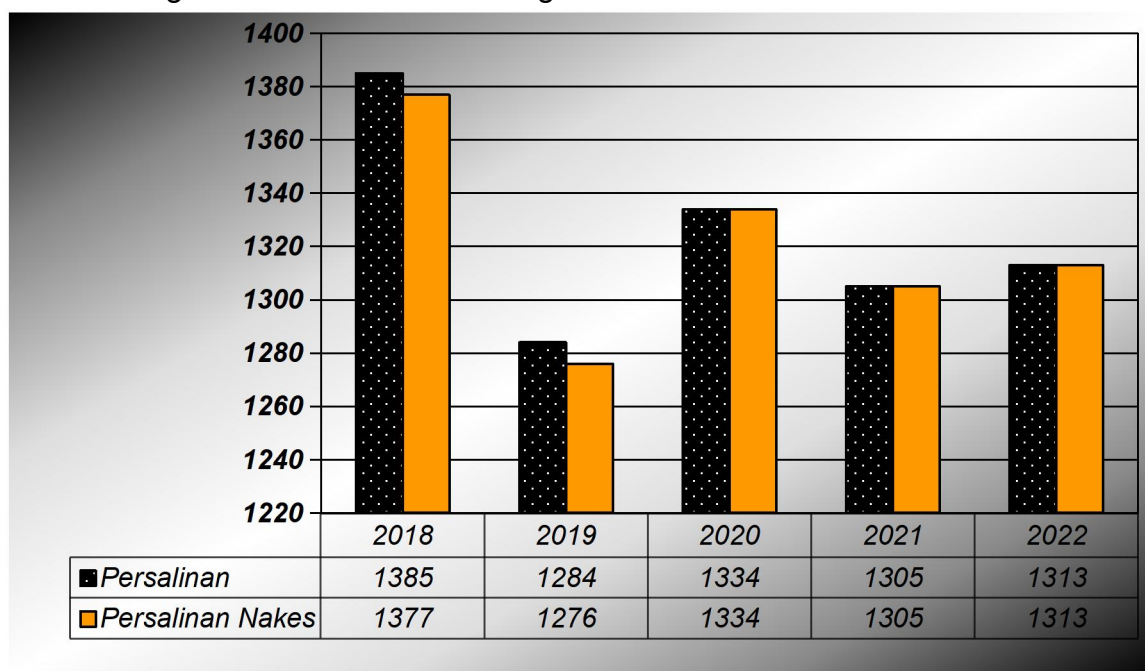
Grafik 2.10

Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2022



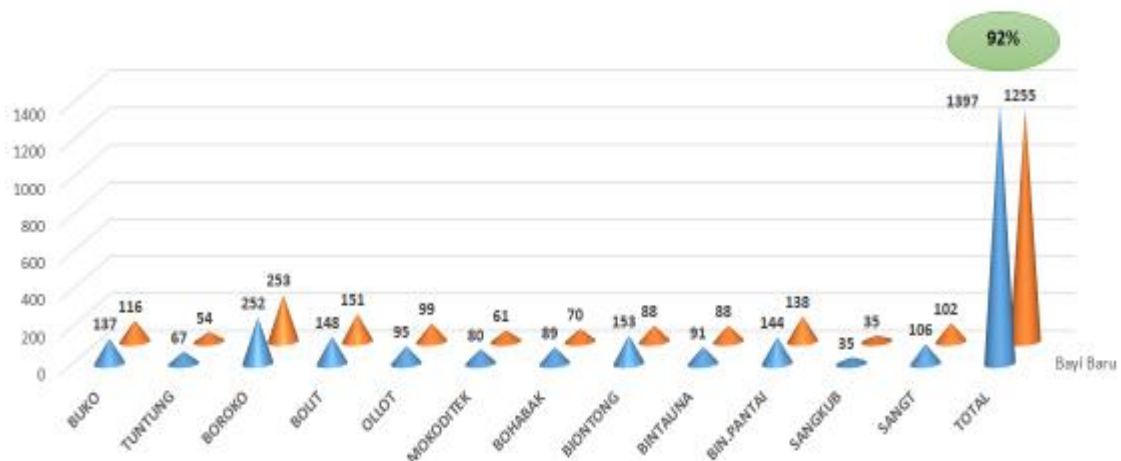
Berdasarkan grafik diatas, capaian presentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 89.5%. Capaian ini belum mencapai target kinerja tahunan Dinas Kesehatan dan Target Nasional. Hal ini karena Sasaran Ibu Hamil dari Pusdatin dan jumlah ibu bersalin secara Ril terdapat perbedaan, selain itu juga terdapat ibu hamil yang domisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetapi selama hamil dan bersalin berdomisili diluar kabupaten sehingga tidak terjangkau oleh Pelayanan Kesehatan. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seluruh ibu bersalin melaksanakan proses persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan mitra kerja dengan dukun bayi, dukun bayi membawa ibu bersalin ke Fasyankes dan proses persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di dampingi oleh dukun bayi, selain itu dengan memberikan advokasi pada ibu hamil pada saat melakukan pelayanan antenatal care (Pemeriksaan kehamilan) untuk melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Grafik 2.11
Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2018 s.d 2022



3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

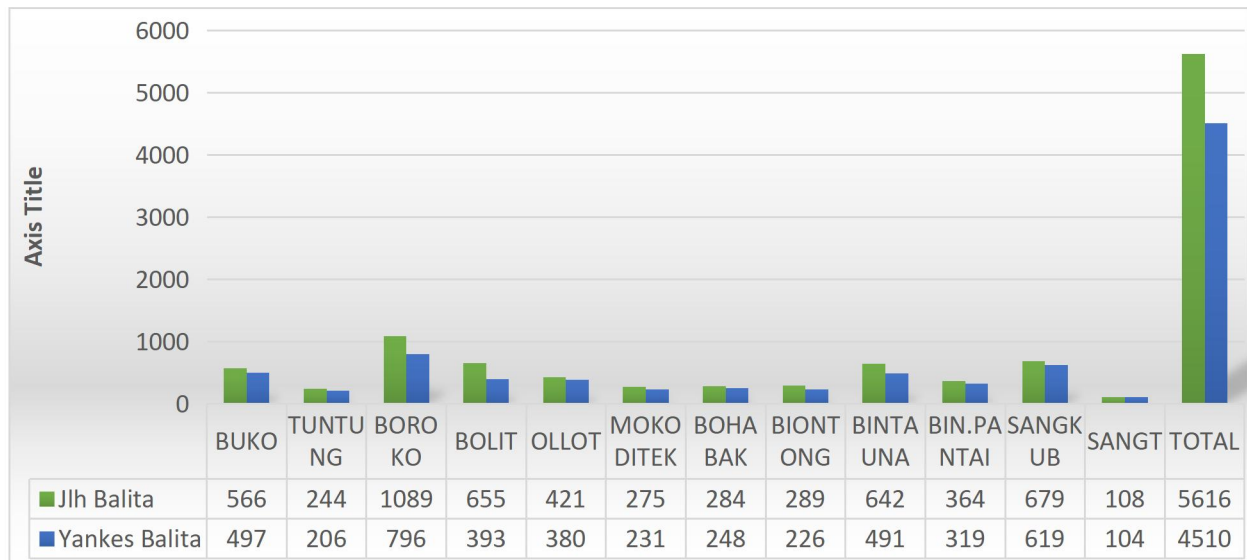
Grafik 2.12
Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2022



Berdasarkan grafik diatas, capaian presentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 92%, Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum mencapai target Kabupaten dan Target SPM Nasional. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga dilaksanakan kunjungan rumah (Home Care) untuk memberikan pelayanan kepada bayi baru lahir dan pemberian imunisasi HB-0 0-7 Hari.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

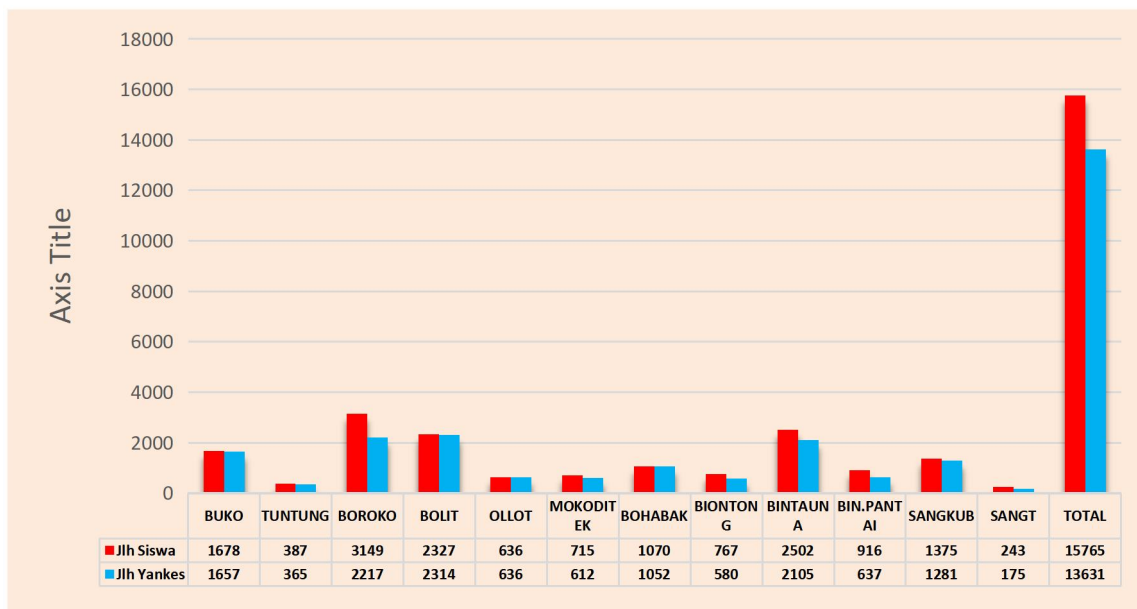
Grafik 2.13
Presentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2022



Berdasarkan grafik diatas Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 80,3%, capaian pelayanan kesehatan balita yang tertinggi di puskesmas Sangtombolang 96.3% dan yang terendah Puskesmas Boroko 73.1%. Pelayanan kesehatan balita dilaksanakan di fasyankes dan di Posyandu Bayi/balita yang dilaksanakan rutin setiap bulan berjalan. Selain itu tenaga puskesmas melaksanakan kunjungan rumah bagi bayi/balita yang tidak hadir di posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan dan juga dilaksanakan sweeping imunisasi jika bayi tersebut merupakan sasaran untuk di imunisasi dan tidak hadir di posyandu. Selain itu juga dilaksanakan pemantauan KIPPI (Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Imunisasi) jika bayi yang di imunisasi di fasyankes dan di posyandu mengalami gejala seperti panas dan bengkak di area tempat penyuntikan dan melapor ke kader/ petugas kesehatan, maka dilakukan kunjungan rumah untuk memberikan pengobatan kepada bayi tersebut.

5. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar

Grafik 2.14
Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2022

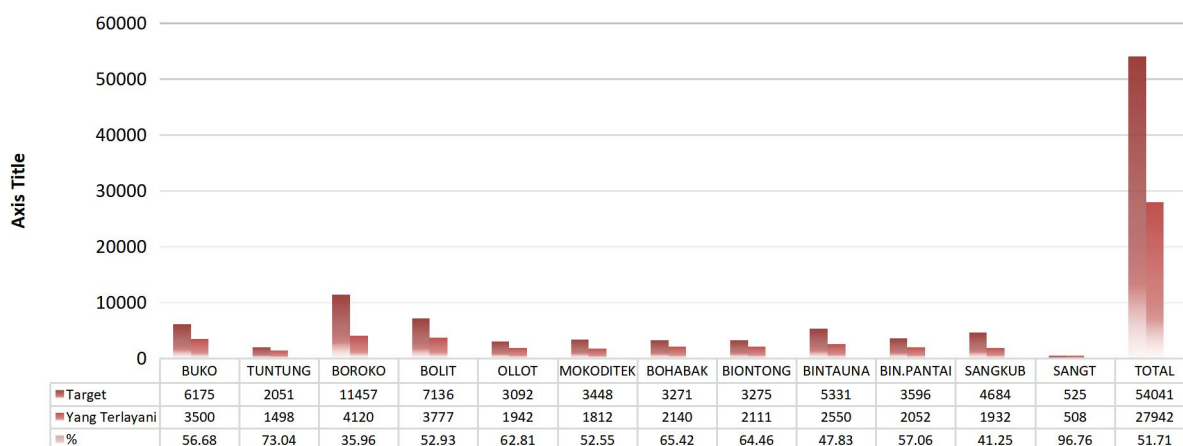


Berdasarkan grafik diatas, capaian presentase pelayanan kesehatan kepada anak usia sekolah dilaksanakan 86.46%, dari total Usia Sekolah & Remaja Di Dalam Sekolah, yang dilaksanakan penjangkaran untuk siswa kelas I SD 3624 Siswa (91.4%). Masalah pada Pelayanan Kepada Anak Usia Pendidikan Dasar tidak tercapai karena pada saat pelaksanaan pelayanan kesehatan adanya anak sekolah yang tidak hadir.

6. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Grafik 2.15

Presentase Usia Produktif (15-59 Tahun) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

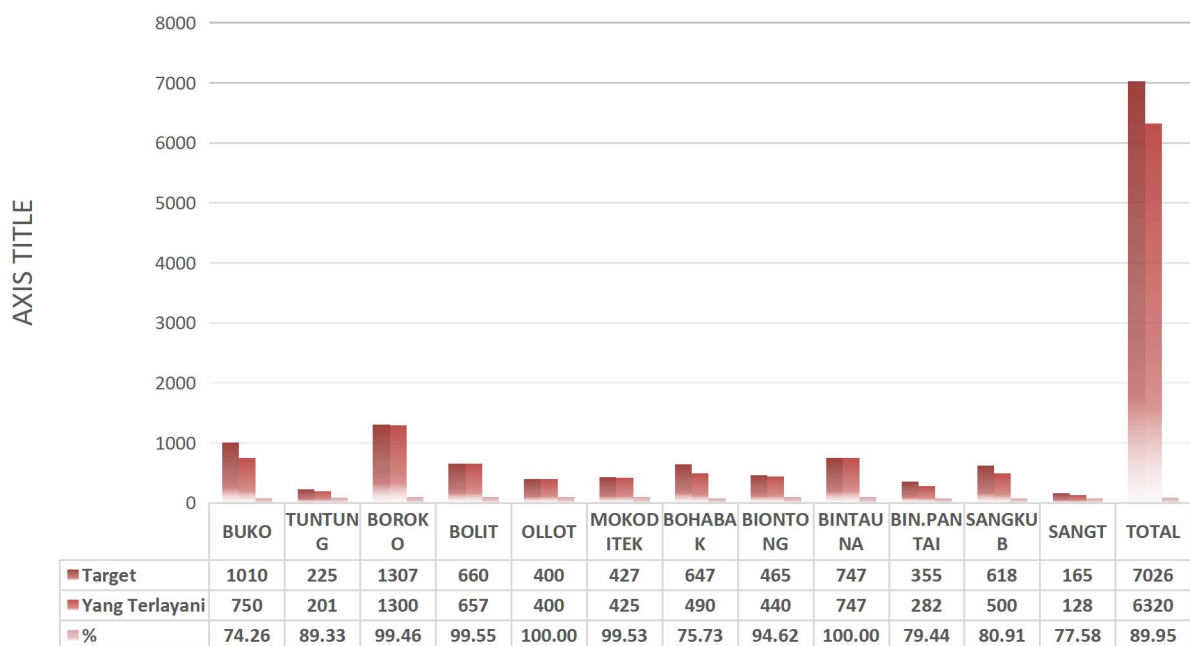


Berdasarkan grafik diatas, presentase usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih dibawah target 51.71%, hal ini karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang pada pelayanan Posbindu di tiap desa, walaupun secara keseluruhan desa sudah ada posbindu. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan mengaktifkan Posyandu Remaja dan Pra Lansia di Tingkat Desa.

7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Grafik 2.16

Presentase Usia Lanjut (>60 Thn) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2022



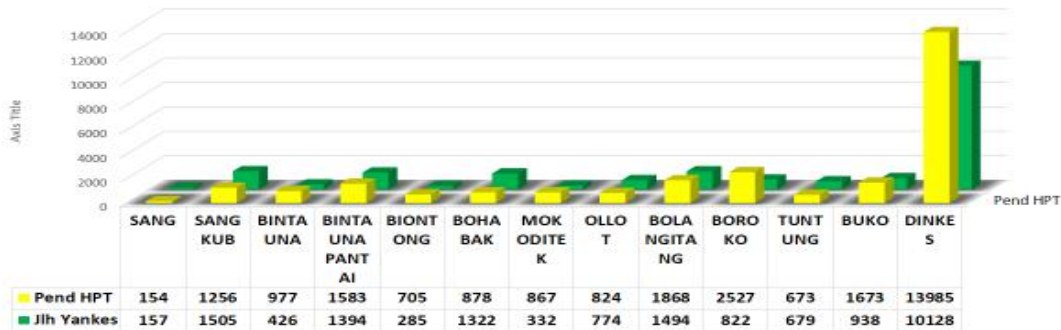
Berdasarkan grafik diatas, presentase usia lanjut (>60 thn) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 89.95%, dari Total jumlah Usia Lanjut semua dilaksanakan skrining kesehatan/ pelayanan kesehatan pada usia lanjut dilaksanakan di Fasyankes dan di Posyandu Lansia/ Posbindu yang dilaksanakan setiap bulan berjalan. Dan bagi Lansia yang tidak berkunjung ke posyandu Lansia dilaksanakan Home Care / Kunjungan Rumah oleh petugas Lansia untuk dilaksanakan skrining kesehatan.

8. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi

Skala Prioritas Nasional dalam mencapai Indonesia sehat salah satunya adalah menanggulangi penyakit tidak menular (PTM) termasuk didalamnya hipertensi, diabetes mellitus yang prevalensinya semakin meningkat. Pelayanan kesehatan bagi

penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi perubahan gaya hidup/ kepatuhan minum obat serta melakukan rujukan jika diperlukan.

Grafik 2.17
Presentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan



Berdasarkan grafik diatas, presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan 72%, secara keseluruhan di tiap puskesmas. Dari Estimasi/Sasaran Penderita Hipertensi 13985, jumlah yang mendapatkan pelayanan 10128 Orang (72%), Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dilaksanakan di Fasyankes dan di Posbindu PTM yang dilaksanakan rutin setiap bulan berjalan di tiap desa namun mengalami masalah pelayanan dengan adanya pandemic Covid-19 sehingga rendahnya masyarakat yang di skrining.

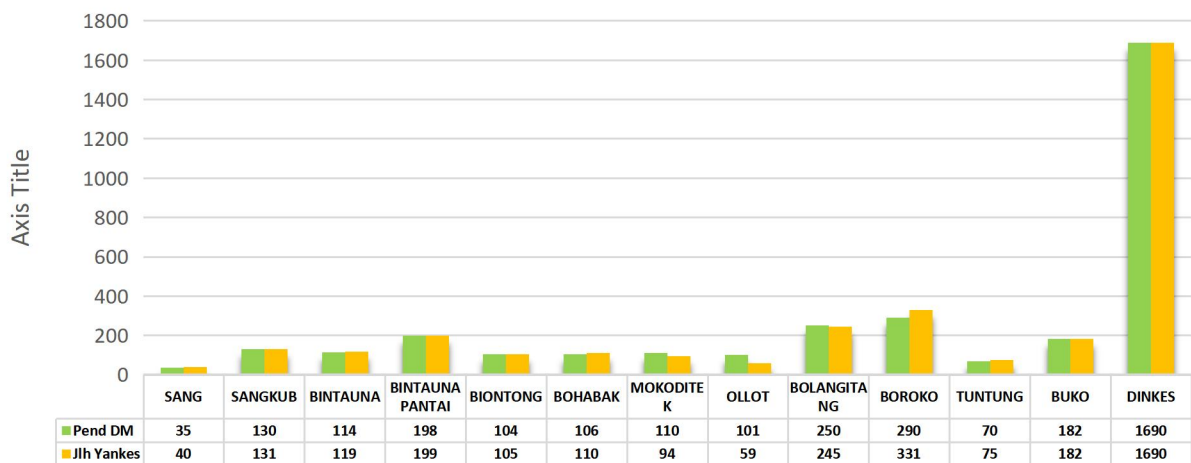
Presentase penderita hipertensi terbanyak adalah perempuan sebanyak 7345 orang dan penderita hipertensi laki-laki 2783 orang. Dari total penderita hipertensi yang tertinggi di Puskesmas Sangkub 1505 Orang

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar meliputi, pengukuran gula darah yang dilakukan minimal 1 kali sebulan di Fasyankes, edukasi perubahan gaya hidup serta melakukan rujukan jika diperlukan.

Jumlah penderita diabetes mellitus di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1690 Orang dari Total Estimasi Penderita diabetes Melitus 1690, penderita laki-laki berjumlah 437 Orang dan perempuan 1253 Orang lebih banyak dari penderita laki-laki. Wilayah kerja Puskesmas Boroko merupakan daerah dengan tingkat penderita DM paling banyak yaitu 331 Orang.

Grafik 2.18
Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2022



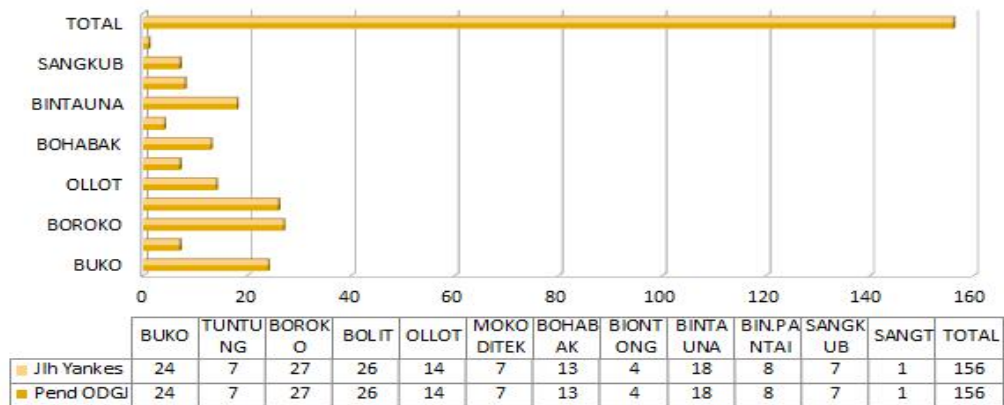
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Upaya pelayanan kesehatan jiwa mengacu pada standar pelayanan minimal dimana jumlah ODGJ berat di wilayah kerja puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun yang bertujuan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.

Berdasarkan hasil penemuan kasus baru di tahun 2020, terdapat 64 kasus baru, wilayah kerja Puskesmas Boroko, Puskesmas Bolangitang dan Puskesmas Ollot merupakan puskesmas dengan tingkat penemuan kasus baru yang tinggi. Jumlah keseluruhan kasus ODGJ adalah 116 kasus dan masih ada beberapa penderita kesehatan jiwa yang belum terdata.

Pada Tahun 2021 jumlah Penderita ODGJ 163 dan jumlah yang terlayani 163 (100%). Dan Pada Tahun 2022 Jumlah Penderita 156 dan Jumlah Terlayani 156 (100%). Upaya dari Dinas Kesehatan untuk melaksanakan Pengadaan Obat Psikotropika untuk penanganan penderita ODGJ yang bersumber dari Dana DAU maupun Dana DAK.

Grafik 2.19
Persentase ODGJ Mendapatkan Pelayanan Kesehatan



11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Persentase Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2022

NO	PUSKESMAS	*TARGET PENEMUAN KASUS TB	PENEMUAN KASUS TB			%
			BTA +	RONTGEN	TOTAL	
1	BUKO	27	10	11	21	77.7
2	TUNTUNG	11	2	4	6	54.5
3	BOROKO	48	26	8	34	70.8
4	BOLANGITANG	28	31	15	46	164
5	OLLOT	17	1	12	13	76.4
6	MOKODITEK	14	8	3	11	78.5
7	BOHABAK	15	14	0	14	93.3
8	BIONTONG	18	5	6	11	61.1
9	BINTAUNA	29	13	9	22	75.8
10	BINTAUNA PANTAI	17	5	4	13	76.4
11	SANGKUB	27	6	8	12	44.4
12	SANGTOMBOLANG	5	4	3	7	140
TOTAL		257	125	83	208	80.9

Pelayanan TBC sesuai standar Pelayanan Minimal Kesehatan menjadi tolak ukur pelayanan yang bermutu di Fasilitas Kesehatan. Dalam indikator keberhasilan program Tuberkulosis mengacu pada angka pengobatan semua kasus TBC atau Case Detection Rate (CDR). Namun, adanya beberapa masalah yang terjadi di Puskesmas dalam mencapai angka CDR sesuai target SPM Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow



Utara 100% dan capaian program Tuberkulosis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 80.93%. Akan tetapi, capaian berdasarkan target Nasional 100%, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dibawa target nasional. Selain itu ketersediaan SDM yang terlatih masih kurang, sehingga proses diagnosa dini dari pengelola program belum efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan Pelatihan SDM dalam peningkatan pengetahuan petugas Tuberkulosis di puskesmas. Dalam menanggulangi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menugaskan Wasor (Wakil Supervisor) Tuberkulosis untuk melaksanakan OJT (On The Job Training). Ketersediaan logistik di puskesmas menjadi salah satu pendukung pengobatan kasus kusta sesuai standar. Pengelola program wajib melakukan pengambilan logistik untuk memenuhi kebutuhan OAT di Puskesmas.

Transid penemuan kasus TBC tahun 2022 sebanyak 208 kasus, dari target 257 kasus. Penemuan kasus tahun 2022 mengalami penurunan dari 2021, dikarenakan banyak pengelola program yang pindah tugas/mutasi/berhenti. Sehingga kegiatan penemuan kasusnya menurun dan adanya kekosongan tenaga analis dalam Lab TBC sehingga pemeriksaan di puskesmas pun menurun. Pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi Peningkatan Kasus TB Paru karena dengan dilakukan Skrining dan Trecing Covid-19 angka penemuan kasus TB menjadi meningkat, dengan gejala TB Paru dan Covid-19 yang hampir mirip.

Pengelola program puskesmas wajib melakukan penjangkaran di setiap wilayah kerja Puskesmas untuk menjangkari penderita-penderita kasus Tuberkulosis. Dalam menjangkari kasus kusta di setiap wilayah kerja puskesmas, pengelola-pengelola program melaksanakan kegiatan inovasi 'Ketuk Pintu dengan Hati', yang merupakan kegiatan dalam rangka menjangkari kasus Tuberkulosis secara dini dimasyarakat. Akan tetapi adanya Stigma dimasyarakat yang masih tinggi mengenai Kasus Tuberkulosis membuat kegiatan ketuk pintu ini kurang efektif. Ketersediaan KIE di puskesmas diusahakan dapat menurun stigma dimasyarakat, karena melalui KIE secara tidak langsung mengubah pola pikir masyarakat yang salah mengenai kasus Tuberkulosis.

Angka keberhasilan pengobatan pasien TBC dipengaruhi oleh kepatuhan berobat pasien. Dalam mengetahui keberhasilan pengobatan pasien dapat dilihat dari hasil pemeriksaan follow up pasien TBC yang dilakukan pemeriksaan pada bulan 2, 5, dan akhir pengobatan. dengan hasil pemeriksaan follow up yang menunjukkan hasil pemeriksaan bakteri Tuberkulosis pada pasien tidak terdeteksi lagi atau BTA Negatif. Akan tetapi pemenuhan SDM yang mempunyai di Puskesmas menjadi salah 1



penentuan keakuratan pemeriksaan. Masalah yang ditemukan di puskesmas, dari beberapa Puskesmas di Kab. Bolaang Mongondow Utara tidak memiliki Tenaga Analis Kesehatan untuk melaksanakan pemeriksaan Mikroskopis tersebut. Dari 12 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdapat 5 puskesmas yang belum memiliki tenaga analis.

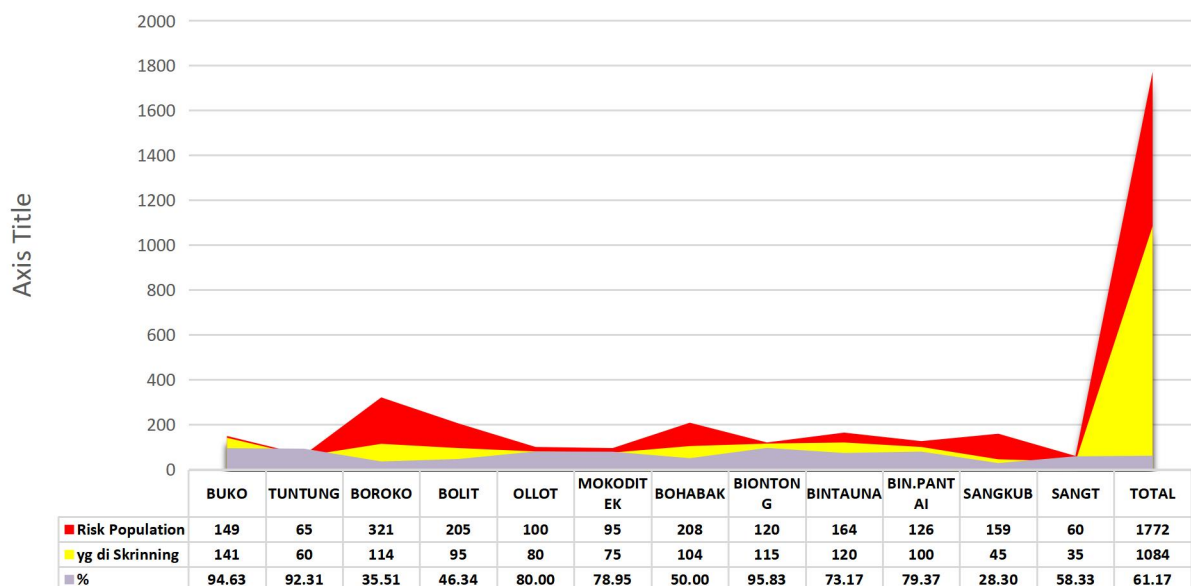
Dalam mendiagnosa terduga TBC terbagi atas dua diantaranya Pemeriksaan Klinis dan Pemeriksaan bakteriologis. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagian besar untuk mendiagnosa terduga TBC masih menggunakan pemeriksaan bakteriologis atau pemeriksaan mikroskopis. akan tetapi disebagian kasus, pemeriksaan melalui klinis (Rontgen) menjadi diagnosa utama dikarenakan terduga tidak memiliki dahak atau terduga kasus TBC anak. Dari beberapa kasus yang ditemukan, terduga yang perlu melakukan pemeriksaan ronsen, tapi tidak memeriksakannya ke fasilitas kesehatan yang menunjang untuk pemeriksaan ronsen di karenakan faktor ekonomi. oleh karena itu, dengan adanya pemenuhan fasilitas pemeriksaan klinis (Rontgen) di RSUD Bolmut turut mendukung capaian akan penemuan kasus di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ketersedian pemeriksaan penunjang untuk melihat kemampuan kerja obat dalam melawan bakteri Tuberkulosis, maka perlu adanya pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molukuler) untuk memeriksa pasien yang sensitif atau resisten obat TBC. Akan tetapi, pemeriksaan TCM tersebut belum efektif dalam penggunaannya. keterbatasan logistik dan SDM dalam pemeriksaan TCM menjadi hambatan pemeriksaan uji sensitifitas obat pada pasien.

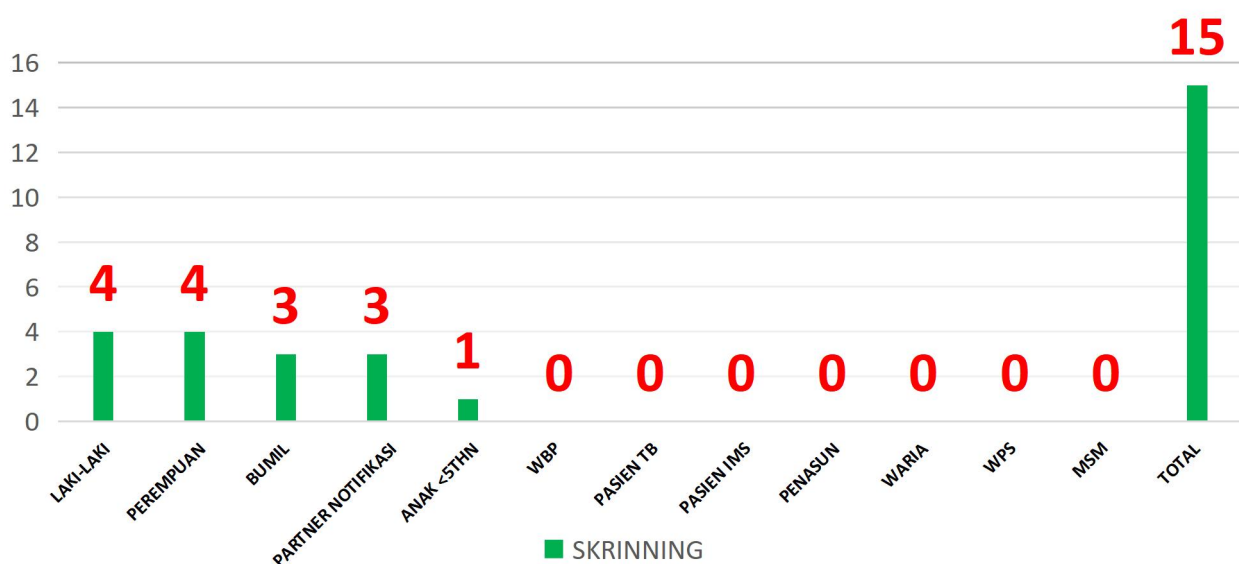
12. Pelayanan Kesehatan Orang Risiko Terinfeksi Virus HIV

Grafik 2.20

Presentase Orang Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan



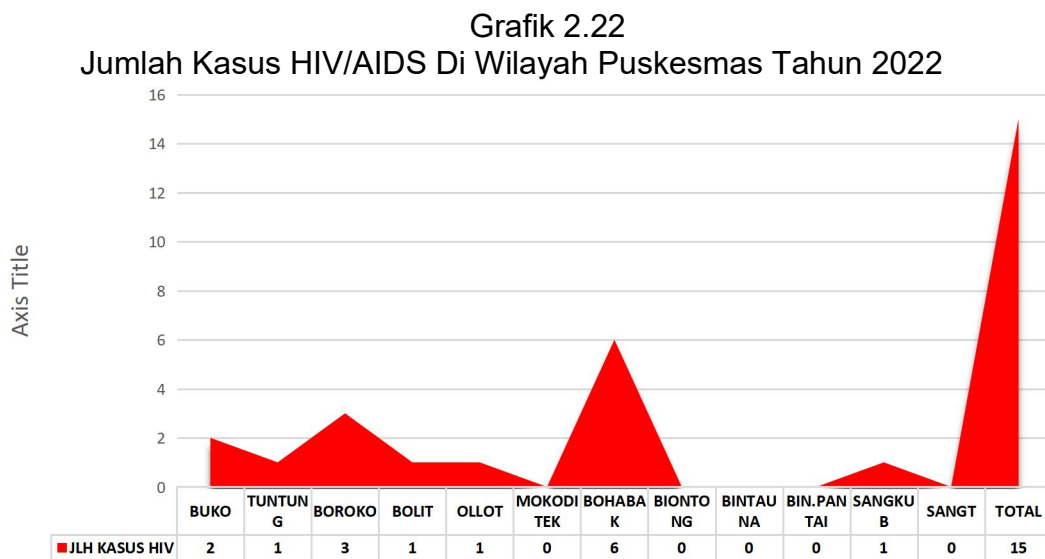
Grafik 2.21
Jumlah Kasus HIV/AIDS Tahun 2022



Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV/AIDS menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang harus di capai oleh setiap kabupaten. Program HIV/AIDS mencakup perawatan, dukungan dan pengobatan baik pasien ataupun kelompok-kelompok beresiko lainnya diantaranya MSM, WPS, Waria, Penasun, Pasien IMS, Pasien TB, WBP, Ibu Hamil. Dalam cakupan penemuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 15 Kasus dan Tahun 2021 12 Kasus. Dari 15 Kasus di Tahun 2022 terdapat 5 kematian karena HIV/AIDS sehingga jumlah Pasien yang sementara dilakukan pengobatan 10 Orang.



Capaian kasus HIV/AIDS di Puskesmas yang tertinggi terdapat pada Puskesmas Bohabak 6 Orang.



Dalam mencapai estimasi skrining dan pelayanan deteksi dini pada kelompok beresiko diperlukan adanya SDM dan Logistik yang menunjang. Untuk melaksanakan skrining perlunya logistik berupa RDT HIV yang diperiksa oleh Pengelola program HIV dan Analis kesehatan. Jumlah cakupan skrining yang harus dicapai sebanyak 1084 jiwa. Pemeriksaan dini HIV dilaksanakan oleh pengelola program baik di PKM ataupun pelayanan Mobile.

Dalam pengobatan pasien di kabupaten diperlukan adanya Layanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan). Puskesmas yang menjadi lokus pembentukan layanan PDP diantaranya Puskesmas Boroko, Puskesmas, Bintauna dan Puskesmas Sangkub. Dengan adanya layanan PDP di kabupaten, Semua pasien yang ditemukan dapat di obati di kabupaten. Sampai saat ini pelayanan pengobatan pasien HIV di kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih merujuk ke Pelayanan PDP di Kota Manado (RSUP Kadow Malalayang). Dalam pembentukan layanan PDP nanti Pengelola program, dokter, farmasi, dan pengelola RR yang terlatih. Oleh karena itu perlunya peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam rangka pembentuk PDP, yang merupakan dukungan layanan untuk menunjang program HIV/AIDS.

Pelaksanaan skrining di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sering kali menemui hambatan diantaranya stigma yang tinggi dimasyarakat mengenai HIV/AIDS, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS, Logistik pemeriksaan. Dalam menunjang pelayanan skrining tersebut perlunya adanya dukungan dari berbagai sektor,

sehingga pelayanan skrining di masyarakat tidak menuai masalah dikemudian hari. Dukungan aparat kepolisian dalam mendampingi skrining di lokasi atau tempat-tempat hiburan yang menjadi populasi beresiko sangatlah dibutuhkan. Untuk mencapai pelayanan deteksi dini HIV pada kelompok beresiko yang sesuai standar maka perlu kerjasama dari berbagai pihak sehingga kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai pelayanan yang sesuai standar.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau Rencana Strategis (RENSTRA) dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa datang. Jadi, Isu strategis bidang kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Bidang Kesehatan dapat dilaksanakan dengan optimal di Daerah dengan memperhatikan mutu pelayanan dasar setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis, yaitu 1) Standar dan jumlah barang dan/atau jasa; 2) Standar jumlah dan kualitas personel/ sumber daya manusia kesehatan; 3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Dalam mengimplementasikan SPM Bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat merencanakan kebutuhan sumber daya sesuai dengan standar teknis setiap jenis indikator baik menyangkut kualitas intervensi dan sumber daya yang diperlukan sesuai diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Hasil identifikasi isu strategis sebagai berikut

1. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten



2. Penguatan Upaya kesehatan masyarakat melalui upaya promotive, preventif dan pemberdayaan masyarakat
3. Pemenuhan standar pelayanan Rumah Sakit
4. Penguatan kompetensi SDM Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dan RSUD.
5. Pemenuhan jumlah dan jenis SDM Kesehatan
6. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi.
7. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar.
8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi.
9. Penguatan Manajemen sistem pelayanan Ibu hamil dan melahirkan di pelayanan primer dan rujukan
10. Pemerataan fasilitas pelayanan dan tenaga Kesehatan
11. Pembiayaan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), berupa kecukupan anggaran untuk UKM dari APBN/BOK, kapitasi dan dana desa, serta APBD.
12. Kebijakan pemerintah daerah untuk Jaminan Kesehatan Nasional (Universal Health Coverage).
13. Implementasi GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
14. Pembangunan Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS PK).
15. Peningkatan tata kelola kualitas Universal Child Immunization (UCI)
16. Pergeseran pola penyakit/ triple borden disease (terutama TB, HIV/AIDS, DM, hipertensi, gangguan jiwa).
17. Komitmen Global berupa Sustainable Development Goals (SDGs) terutama Target nasional berupa Komitmen eliminasi penyakit menular (Indonesia eliminasi TB tahun 2030, Indonesia bebas Rabies tahun 2030, Indonesia eliminasi Filariasis tahun 2020, Indonesia eliminasi Malaria 2030)



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPP dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-PD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Perangkat Daerah telah terakomodir didalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat 1 (satu) Program yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan, yaitu: Program Pelayanan Kesehatan. Dengan tetap mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan maka pada tahun 2024 program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten tahun 2024 dimana didalamnya terdapat 5 (Lima) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 61 (Enam Puluh Satu) Sub kegiatan yang secara umum dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2024		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2024		
			(1)	(2)			(12)	(13)	
	(1)	(2)	(12)	(13)	(1)	(2)	(12)	(13)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	DINAS KESEHATAN		79,152,047,539	DINAS KESEHATAN		87,717,047,539	8,565,000,000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	51,031,332,952	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelengkapan Administrasi keuangan	100%	52,246,332,952	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100%	55,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100%	55,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	55,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	55,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	44,355,412,213	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%	44,355,412,213	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Org	33,255,18,423	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Org	33,255,18,423	
				11,100,293,790				11,100,293,790	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	30,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	100%	50,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Org	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Org	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Umum	100%	1,047,725,739	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Umum	100%	1,047,725,739	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	16 Paket	82,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	16 Paket	82,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dididirikan	17	135,725,739	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dididirikan	17	135,725,739	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Lap	830,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Lap	830,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	970,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	1,370,000,000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dididirikan	16 Paket	390,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dididirikan	16 Paket	590,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dididirikan	25 Unit/Jenis	580,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dididirikan	25 Unit/Jenis	780,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang Dididirikan	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang Dididirikan	1	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100%	2,299,905,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100%	2,804,905,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Lap	44,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Lap	49,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dididirikan	17 Lap	826,905,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dididirikan	17 Lap	1,076,905,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	17 Lap	489,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	17 Lap	539,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dididirikan	17 Lap	940,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dididirikan	17 Lap	1,040,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100%	2,273,290,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100%	2,423,290,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	970,090,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	1,070,090,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	173,200,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	223,200,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/Kantor Yang Terpelihara	14 Unit	1,130,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/Kantor Yang Terpelihara	16	1,130,000,000	



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2023		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2023		
			(12)	(13)			(12)	(13)	
	(1)	(2)	(12)	(13)	(1)	(2)	(12)	(13)	(13)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Dasar	BAIK	19,627,406,620	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Dasar	BAIK	23,977,406,620	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar	93	4.642.000,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar	93	7.842.000,000	
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	221,000,000	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	221,000,000	
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	400,000,000	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	1,400,000,000	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	200,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	200,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	208,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	208,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	500,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	100,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	100,000,000	
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	225,000,000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	225,000,000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	188,000,000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	388,000,000	Penambahan 1 RS Pratama
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	42	2,300,000,000	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	42	4,300,000,000	Penambahan 1 RS Pratama
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	13	100,000,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	13	100,000,000	
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	2	100,000,000	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	2	100,000,000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12	100,000,000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12	100,000,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	85	14.695.406.620	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Pelayanan Ibu, Anak, Remaja, Usia Produktif dan Lanjut Usia > 85%	90	15.695.406.620	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1400	56,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1400	56,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1360	57,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1360	57,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1310	30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1310	30,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4570	57,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4570	57,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13650	30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13650	30,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27962	32,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27962	32,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6340	33,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6340	33,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10930	55,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10930	55,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1710	55,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1710	55,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Yang mendapatkan Pelayanan ODGJ Sesuai Standar	154	30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Yang mendapatkan Pelayanan ODGJ Sesuai Standar	154	30,000,000	



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2023		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2023		
			(12)	(13)			(12)	(13)	
	(1)	(2)	(12)	(13)	(1)	(2)	(12)	(13)	(13)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220	55,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Mendapatkan p	220	55,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100	50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Mendapatkan pelayanan	1100	50,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi Bencana dan Daerah DTPK	1	99,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi Bencana dan Daerah DTPK	1	99,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	182,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	182,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	45,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerg	1	45,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	110,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	110,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	32,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	32,000,000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	270,000,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	270,000,000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	205,000,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	205,000,000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	300,000,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	300,000,000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	10,419,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	10,419,000,000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	90,000,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	90,000,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1,495,750,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1,495,750,000	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	349,000,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	349,000,000	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	430,000,000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	1,430,000,000	Penambahan 1 RS Pratama
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13	70,000,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13	70,000,000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	58,656,620	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	58,656,620	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas C	0	150,000,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas C	0	300,000,000	
		Jumlah RS Kelas D	1			Jumlah RS Kelas D	1		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Dawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	150,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Dawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	300,000,000	Penambahan 1 RS Pratama
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Fasyankes Yang Melaporkan Data dan Informasi Kesehatan	100	140,000,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Fasyankes Yang Melaporkan Data dan Informasi Kesehatan	100	140,000,000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	13	140,000,000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	13	140,000,000	
	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	97	8,313,307,967	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	97	11,313,307,967	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM yang dilaksanakan	1	8,313,307,967	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM yang dilaksanakan	17 Lap	11,313,307,967	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	700	8,233,307,967	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	700	11,233,307,967	Penambahan 1 RS Pratama
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	80,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	80,000,000	



RENCANA KERJA (RENJA) 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2023		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2023		
			(12)	(13)			(12)	(13)	
	(1)	(2)	(12)	(13)	(1)	(2)	(12)	(13)	(13)
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg memiliki Izin Operasional dan Sesuai Standar	57	40,000,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg memiliki Izin Operasional dan Sesuai Standar	57	40,000,000	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg mendapatkan rekomendasi Izin Usaha	14	40,000,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg mendapatkan rekomendasi Izin Usaha	14	40,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	40,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	40,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan UKBM	100	140,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan UKBM	100	140,000,000	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang melaporkan kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100	60,000,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang melaporkan kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100	60,000,000	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	60,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	60,000,000	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Melaporkan Kegiatan Promotif, Preventif	100	80,000,000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Melaporkan Kegiatan Promotif, Preventif	100	80,000,000	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	80,000,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	80,000,000	



Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik, pengadaan sarana kesehatan lainnya, Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Miskin serta pengadaan makanan tambahan bagi Balita, Ibu Hamil dan Lansia.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersebar (58 Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	500 peserta	Usulan Musrenbang (58 Usulan/Desa/Kel)
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan	Tersebar (13 Usulan Desa)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Paket Pengadaan Susu Bumil KEK	Usulan Musrenbang (13 Usulan/Desa/Kel)
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tersebar (17 Usulan Desa)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Paket Pengadaan Susu Lansia	Usulan Musrenbang (17 Usulan/Desa/Kel)
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Bolangitang I Ollot	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat	3 Unit	Usulan Musrenbang (Akan Disulkan Melalui Anggaran



		Talaga Bintauna Mokoditek	Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Puskesmas Yang Sesuai Standar		DAK)
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Ollot Talaga Bintauna	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersebar (35 Usulan Desa)	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Implementasi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).



ARAH KEBIJAKAN RPJMN BIDANG KESEHATAN 2020-2024

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi Percepatan perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

STRATEGI RPJMN 2020-2024

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

Tujuan Prioritas RPJMN

1. Peningkatan KIA, KB, dan Kesehatan Reproduksi
2. Perbaikan gizi masyarakat
3. Pembudayaan GERMAS
4. Peningkatan pengendalian penyakit
5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan .

Tujuan Strategi Kementerian Kesehatan

1. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu
2. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
3. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan Pengarusutamaan Kesehatan
4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan sumber daya kesehatan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik



Tabel 3.1

Telaah Indikator Sasaran Pokok RPJMN Teknokratik Bidang Kesehatan 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026

No	Indikator	Status Awal	Target K/L 2024	Target Dinas Kesehatan			Permasalahan
				2024	2025	2026	
1.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	305	183	155	153,8	151,5	Sesuai Data Tahun 2022 AKI 232,7 Per 100.000 KLH, (3 Kasus), dengan adanya factor pendukung program diharapkan dpt menurunkan AKI di Kab. Bolaang Mongondow Utara
2	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	24	16	7,7	7,6	7,5	Sesuai Data Tahun 2022 AKB 6,8 Per 1000 KLH, (9 Kasus), walaupun masih dibawah dari angka nasional, dioptimalkan untuk tetap menurunkan AKB
3.	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern (mCPR)	57.2	63,4				
4.	Unmet Need KB (persen)	10.6%	7.4%				
5.	ASFR 15-19 Tahun	36	18				
6.	Prevalensi stunting pada balita (%)	30.8%	14%	3	2,5	2,10	Sesuai Data Tahun 2022 2,21%, walaupun masih dibawah dari angka nasional, dioptimalkan untuk tetap menurunkan Stunting
7.	Prevalensi wasting pada balita (%)	10.2	7				
8.	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0.24	0.18				
9.	Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	319	190	82	83	84	Masih Tingginya Kasus TB dengan Data tahun 2022 angka penemuan kasus TB 80.9%.
10.	Eliminasi malaria (kab/kota)	285	405				
11.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 Tahun	9.1	8.7				
12.	Prevalensi obesitas	21.8	21.8				



	pada penduduk umur \geq 18 Thn						
13.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan	57.9%	90%				
14.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi	40%	100%	95,5	96	96,5	Sesuai data Tahun 2022 capaian Faskes terakreditasi 92,3%, hal ini karena belum adanya pelaksanaan survey akreditasi dari komisi akreditasi setelah masa pandemic covid-19.
15.	Persentase rumah sakit terakreditasi	63%	100%	95,5	96	96,5	Sesuai data Tahun 2022 capaian Faskes terakreditasi 92,3%, hal ini karena belum adanya pelaksanaan survey akreditasi dari komisi akreditasi setelah masa pandemic covid-19.
16.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuaistandar	23%	83%				
17.	Persentase puskesmas tanpa dokter	15%	0				
18.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	86%	96%				
19.	Persentase obat memenuhi syarat	80.9%	92.3%				
20.	Persentase makanan memenuhi syarat	71%	90%				



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dinas Kesehatan menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat perkotaan. Masalah kesehatan yang disadari antara lain masalah lingkungan pemukiman, gizi, kesehatan reproduksi maupun penanggulangan penyakit menular yang ada di lingkungan kota maupun yang datang dari luar kota.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yaitu **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tersebut di atas, maka sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,10	68,23	68,36
			- Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	/100.000 KLH	155	153,8	151,5
			- Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 KLH	7,7	7,6	7,5
			- Persentase Angka Penemuan Penyakit Menular Tuberkulosis	Persen	82	83	84
			- Prevalensi Penyakit Tidak Menular Hipertensi	Persen	28,3	27,6	26,9
			- Prevalensi Stunting	Persen	3	2,5	2,10
			- Rasio Tenaga Kesehatan	Rasio	1	1,2	1,25
			- Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kesehatan	Persen	95,5	96	96,5
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat	B	BB	BB
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (pini BPK)	Prdikat	WTP	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,5	82,24	83,98



Pemerintah Dan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Akuntabel	Daerah	- Akuntabilitas Kinerja SKPD (LKIP)	Predikat	B	B	BB
		- Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD (Opini BPK)	Temuan	0	0	0

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada table 3.3

Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program, tindakan yang akan dilaksanakan sesuai perencanaan program, untuk memperoleh keluaran (output), dan hasil (outcome) tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Program pembangunan kesehatan tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan pada RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 dan evaluasi capaian pembangunan kesehatan sampai tahun 2023. Program dan kegiatan Dinas



Kesehatan juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap RPJMN, maupun konvensi internasional diantaranya *Sustainable Development Goals* (SDGs), termasuk pula kebijakan pusat seperti Germas, PIS-PK, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuandan sasaran strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun Periode 2024 sd 2026															
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat															
	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat														
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
				Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Dasar	B Indeks Konversi	B Indeks Konversi	19.627.406.620,00	B Indeks Konversi	23.681.363.390,00	SB Indeks Konversi	22.726.406.620,00	SB Indeks Konversi	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase Fasyankes Pemerintah Yang Memiliki Sarana Prasarana Kesehatan Yang Memenuhi Standar	95 Persen	93 Persen	4.642.000.000,00	94 Persen	5.853.956.770,00	95 Persen	5.477.000.000,00	95 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	96 Persen	85 Persen	14.695.406.620,00	86 Persen	17.535.406.620,00	87 Persen	16.959.406.620,00	87 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi												
				Persentase Fasyankes Yang Melaporkan Data Dan Informasi Kesehatan	100 Persen	90 Persen	140.000.000,00	92 Persen	142.000.000,00	95 Persen	140.000.000,00	95 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
				Jumlah RS Kelas C	0 unit	0 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	0,00	DINAS KESEHATAN	



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah RS Kelas D	1 unit	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
				Persentase Fasyankes Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	96,5 Persen	97 Persen	8.313.307.967,00	97,5 Persen	9.529.337.653,00	98 Persen	9.710.536.553,00	98 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
				Jumlah Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.313.307.967,00	1 Kegiatan	9.529.337.653,00	1 Kegiatan	9.710.536.553,00	1 Kegiatan	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
				Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg memiliki Izin Operasional dan Sesuai Standar	55 Persen	57 Persen	40.000.000,00	58 Persen	43.000.000,00	59 Persen	50.000.000,00	59 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)												



				Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha	13 Persen	14 Persen	40.000.000,00	15 Persen	43.000.000,00	16 Persen	50.000.000,00	16 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
				Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan UKBM	97 Persen	98 Persen	140.000.000,00	99 Persen	155.000.000,00	100 Persen	140.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase Fasyankes Yang Melaporkan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	70.000.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
				Persentase Fasyankes Yang Melaporkan Kegiatan Promotif, Preventif	100 Persen	100 Persen	80.000.000,00	100 Persen	85.000.000,00	100 Persen	80.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	



Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel														
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	51.031.332.952,00	100 Persen	51.187.210.913,00	100 Persen	51.990.302.003,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	55.000.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
			Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	44.355.412.213,00	100 Persen	45.186.790.174,00	100 Persen	46.038.952.583,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
			Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
			Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.047.725.739,00	100 Persen	1.215.725.739,00	100 Persen	1.299.725.739,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	970.000.000,00	100 Persen	770.000.000,00	100 Persen	760.000.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	



		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.299.905.000,00	100 Persen	2.330.405.000,00	100 Persen	2.355.305.000,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.273.290.000,00	100 Persen	1.594.290.000,00	100 Persen	1.446.318.681,00	100 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	



BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang :

1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
2. Sesuai dengan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 – 2026 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan / strategi untuk mengarahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan / kendala yang ada dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.
3. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja tahun 2024 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan strategi meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan sebagai pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah menjadi komitmen bersama.



Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Boroko, Maret 2023
Kepala Dinas Kesehatan

ALI DUMBELA,SKM.M.Kes

NIP. 19760716 199903 1 002